

**KERJASAMA EVAKUASI KRI NANGGALA 402 SEBAGAI MOMENTUM TITIK BALIK
KERJA SAMA MARITIM ASEAN**

TESIS



Pembimbing

Dr. Phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.,

PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**KERJASAMA EVAKUASI KRI NANGGALA 402 SEBAGAI MOMENTUM TITIK BALIK
KERJA SAMA MARITIM ASEAN**



Oleh

**Rivaldi Zakie Indrayana
8092101005**

Persetujuan untuk Sidang Tesis Pada Hari/Tanggal:

24 Januari 2024

Pembimbing Tunggal

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Aknolt", is written over a horizontal blue line.

Dr. Phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.,

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Rivaldi Zakie Indrayana

NPM: 8092101005

Program Studi: Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Menyatakan bahwa tesis dengan judul

“KERJASAMA EVAKUASI KRI NANGGALA 402 SEBAGAI MOMENTUM TITIK BALIK KERJA
SAMA MARITIM ASEAN”

Merupakan karya saya seutuhnya di bawah arah Dosen Pembimbing tanpa adanya penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam konteks lingkup akademik.

Jika di kemudian hari terdapat temuan fakta atas pelanggaran yang dilakukan dalam karya tulis ini, Penulis siap menanggung segala risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya termasuk pembatalan gelar akademik yang diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan: di Bandung

Tanggal: 24 Januari 2024



Rivaldi Zakie Indrayana

**KERJASAMA EVAKUASI KRI NANGGALA 402 SEBAGAI MOMENTUM TITIK BALIK
KERJA SAMA MARITIM ASEAN**

Rivaldi Zakie Indrayana (8092101005)

Pembimbing: Dr. Phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Magister Hubungan Internasional

Bandung

Januari 2024

ABSTRAK

Berawal dari pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana Kerjasama Indonesia-Singapura dalam penanganan tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadi titik tolak kerjasama maritim Negara-Negara Anggota ASEAN?” Tesis ini nantinya akan membahas seputar ketegangan di Laut Tiongkok Selatan yang kerap kali terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini tak heran lagi memang selalu saja dapat membuat banyak negara yang terletak di sekitarnya termasuk ASEAN jadi ikut saling bersitegang satu sama lain terlebih lagi karena mereka juga ikut saling mengklaim satu sama lain Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayahnya masing-masing dikarenakan terdapat potensi cadangan gas alam dan minyak bumi yang besar di sana. Ditinjau dari Teori Kerja Sama Internasional, Organisasi Internasional dan *Security Regional Complex* sebagaimana masing-masing membahas tentang pola hubungan antarnegara termasuk dalam kerangka kerja sama di organisasi internasional, Konflik seperti itu seringkali menimbulkan ketegangan militer yang tentunya juga jadi akan sangat mempengaruhi soliditas dan stabilitas mereka negara anggota kawasan, Bahkan pada saat seharusnya dimana mereka dapat memunculkan suatu stabilitas dan keamanan kawasannya itu sendiri. Akan tetapi di saat bersamaan ketika konflik itu masih belum juga reda, Terjadi sebuah peristiwa bencana maritim yang baru pertama kali berlangsung sepanjang peristiwa sejarah Indonesia yakni Tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara pada Bulan April 2021 silam. Kapal selam buatan Jerman tersebut diketahui awalnya mengalami hilang kontak saat sedang mengikuti agenda kegiatan latihan perang di Laut Bali Utara bersama sejumlah armada kapal perang lainnya di TNI Angkatan Laut dan tidak pernah lagi timbul ke permukaan sejak saat itu juga. Sehingga oleh karena itulah, TNI Angkatan Laut kemudian meminta bantuan kepada Sejumlah Negara ASEAN, Tiongkok dan sejumlah negara sahabat melalui ISMERLO guna melakukan evakuasi terhadap KRI Nanggala 402 dan singkat cerita, Hasilnya KRI Nanggala 402 ditemukan dalam keadaan sudah terbelah jadi tiga bagian setelah tenggelam di Kedalaman 838 Meter di Laut Bali Utara. Dari sini, Datangnya bantuan dan berlangsungnya kerjasama antar setiap negara dalam Misi Evakuasi KRI Nanggala 402 ini pun dapat dilihat sebagai cerminan atas titik balik Soliditas Kerja Sama Maritim Negara-Negara ASEAN melalui metodologi penelitian kualitatif berupa studi dokumen pada sejumlah sumber referensi terpercaya.

Kata Kunci: KRI Nanggala 402, TNI Angkatan Laut, ASEAN, Laut Tiongkok Selatan, Soliditas

**EVACUATION COOPERATION OF KRI NANGGALA 402 AS A TURNING POINT
MOMENTUM FOR ASEAN MARITIME COOPERATION**

Rivaldi Zakie Indrayana (8092101005)

Supervisor: Dr. Phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Master's Program in International Relations

Bandung

24th of January 2024

ABSTRACT

The research question, "How is the cooperation between Indonesia and Singapore in handling the sinking of KRI Nanggala 402 a starting point for maritime cooperation among ASEAN Member States?" will be the focus of this thesis. The thesis will delve into the tensions in the South China Sea that have frequently arisen in recent years. Unsurprisingly, these tensions have led to disputes among neighbouring countries, including those in ASEAN, particularly because of conflicting territorial claims in the South China Sea due to significant potential reserves of natural gas and oil. Examining the perspective of International Cooperation Theory, International Organizations, and the Regional Security Complex, each addressing the patterns of inter-state relations within the framework of international cooperation and organizations, conflicts of this nature often lead to military tensions. This, in turn, significantly affects the solidarity and stability of the member states in the region. Conflicts persist Even when stability and security should prevail, and maritime disasters occur. Such a disaster took place for the first time in Indonesia's history with the sinking of KRI Nanggala 402 in the North Bali Sea in April 2021. The German-made submarine lost contact during a scheduled military exercise in the North Bali Sea with other naval vessels of the Indonesian Navy (TNI Angkatan Laut) and never resurfaced. Consequently, the Indonesian Navy sought assistance from several ASEAN countries, China, and friendly nations through ISMERLO to evacuate KRI Nanggala 402. In brief, the outcome was the discovery of KRI Nanggala 402, already split into three parts, at a depth of 838 meters in the North Bali Sea. This incident highlights the solidarity of maritime cooperation among ASEAN. The qualitative research methodology employed in this thesis involves document analysis from various reliable sources.

Keywords: KRI Nanggala 402, Indonesian Navy, ASEAN, South China Sea, Solidarity

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya lah yang pada akhirnya dapat membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini dengan judul “Evakuasi KRI Nanggala 402 sebagai Titik Tolak Atas Kerja Sama Maritim ASEAN” yang tentunya tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan, rintangan dan hambatan selama pengerjaannya belakangan ini. Sehingga oleh karena itulah, Pada bagian kata pengantar ini juga sebelumnya tidak penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah tanpa kenal henti terus memberi dukungan kepada penulis selama mengerjakan tesis ini antara lain:

1. Keluarga, (Alm.) Ayah Yayan Anugrawan yang akan selalu diberikan doa untuk seterusnya. Lalu untuk yang terus selalu ada di sini, Ibu Indraswari & Adik Rannisa Kintan Julyandra atas segala bentuk dukungannya kepada penulis selama tahapan pengerjaan tesis ini.
2. Keluarga Besar Synergy Policies (PT. Cipta Inspirasi Nusantara):
 - a. Segenap jajaran Direksi, *Advisor & Consultants*:
 - Direktur Eksekutif Synergy Policies Ibu Dinna Prapto Raharja, Ph.D.,
 - Para *Senior Advisors*:
 - Bapak Marzuki Darusman, Bapak Makarim Wibisono dan Bapak Faisal Basri.
 - Para *Associate Consultants & Researchers*:
 - Bapak Fransiskus S. Joyoadisumarta,
 - Bapak Timboel Siregar,
 - Bapak Abdul Malik Gismar,
 - Bapak Handi Riza,
 - Ibu Retna Hanani, Ph.D,
 - *Communication Specialist* Ibu Juria Ambar Haruni,
 - *Training Facilitator* Ibu Puri Lestari.

b. Para Staf Synergy Policies Periode 2021-2022:

- Mbak Nadila Amani Alma (*Program & Communication Officer* 2020-2022),
- Para *Intern & Assistants* 2021-2022:
- Mbak Yusi Nurfitriani,
- Catherine,
- Raffa Athallah,
- Shinta Novia Sukma.

c. Para Staf Synergy Policies Periode 2022-2023:

- *Program Assistants*;
- Naufal Fauzan Raihansyah,
- Maula M. Haykal,
- Joan Anindya Wardhani,
- Novihayani Jeane Natasya,
- Lulung Sinandang.
- *Admin Assistants*;
- Clara Sinaga,
- Syafatihah Mylkapuri,
- Audi Ibrahim Chalid.

d. Staf Keuangan Synergy Policies:

- Mbak Riris Sartina (2021-2023) dan Mbak Fidah Pulungan.

3. Teman-Teman Kuliah S2 di Program Studi Magister Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan: Daniel Ananda Pradipta (Nanda) yang juga sudah kuliah bareng-bareng sejak S1 di Tempat yang sama, Deana Rahda Mahalsya, Mas Gufron Mabruri, Mbak Jessica Ika Samudra, Jesica Isarani, Allan, Mbak Galuh Pangestri, Mbak Rika Suparnika, Mbak Dea Rahmawati, Dyn Anugerah, Kak Mae Lucky Iriani, Yoke, Isfan, Mbak Rira Nuradhawati,

Dll. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungannya selama dua tahun ini berkuliah di Prodi MHI Fisip Unpar.

4. Para Dosen di Program Studi Magister Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang juga sudah mengajari penulis sejak Kuliah S-1 di Program Studi, Fakultas dan Universitas yang sama : Mas Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Mbak Sukawarsini “Suke” Djelantik, Mbak Elisabeth Adiningtyas “Nophie” Satya Dewi, Pak Mangadar Situmorang (Sekaligus Rektor Unpar Periode 2015-2023), Mas I Nyoman Sudira (Sekaligus Kaprodi MHI Fisip Unpar 2021-2024), Mbak Sylvia Yazid, Mas Yulius Purwadi Hermawan, Bang Aknolt Kristian Pakpahan (Sekaligus Pembimbing dan Kaprodi MHI Fisip Unpar), Dsb. Terima kasih banyak atas segala dukungannya selama ini.

Akhir kata, Sekiranya demikianlah kata-kata pengantar yang dapat penulis sampaikan di sini. Selebihnya penulis juga tidak lupa ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dalam bagian kata pengantar dan juga tesis ini secara keseluruhannya apabila terdapat kekurangan karena manusia adalah tempatnya itu sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa semata.

Terima Kasih Banyak atas perhatian & kerja samanya.

Bandung, 24 Januari 2024

Rivaldi Zakie Indrayana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Pertanyaan Penelitian (<i>Research Question</i>).....	13
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.5.2 Kegunaan Penelitian.....	14
1.6 Kajian Literatur.....	14
1.7 Kerangka Pemikiran.....	24
1.8 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.....	45

1.8.1 Metode Penelitian Kualitatif dan Studi Pustaka.....	46
1.9 Sistematika Pembahasan.....	47
BAB II KRONOLOGI DAN KERJA SAMA EVAKUASI KRI NANGGALA 402.....	48
2.1 Profil KRI Nanggala 402.....	48
2.2 Kronologi Tenggelmnya KRI Nanggala 402.....	50
2.3 Evakuasi KRI Nanggala 402 oleh Pemerintah Indonesia.....	52
2.4 Evakuasi KRI Nanggala 402.....	54
BAB III PASANG-SURUT HUBUNGAN INDONESIA-SINGAPURA.....	63
3.1 Latar Belakang Hubungan Indonesia-Singapura.....	63
3.2 Kerja sama Bilateral antara Indonesia dan Singapura.....	69
3.2.1 Kerja sama di Bidang Perekonomian.....	69
3.2.2.1 SIJORI.....	69
3.2.2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) antara Indonesia dan Singapura.....	70
3.2.2 Kerja sama di Bidang Pertahanan dan Maritim.....	88
3.2.2.1 <i>Joint Patrol</i>	88
3.2.2.2 Latihan Gabungan.....	90
3.2.2.3 <i>Flight Information Region (FIR)</i>	93
3.3 Masalah yang Mengganggu Hubungan Indonesia dan Singapura.....	96
3.3.1 Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Kabut Asap (2015-2023).....	96
3.3.2 Isu <i>Tax Haven</i>	101

3.4 Perbandingan Kerja Sama Maritim ASEAN Sebelum dan Setelah Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala 402.....	103
3.4.1 Kerja Sama Maritim ASEAN Sebelum Terjadi Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala 402.....	106
3.4.2 Kerja Sama Maritim ASEAN Setelah Terjadi Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala 402.....	109
BAB IV KERJA SAMA MARITIM NEGARA-NEGARA ASEAN.....	112
4.1 Landasan Kerja sama Maritim antara Indonesia dan Singapura dalam Kerangka ASEAN.....	113
4.1.1 Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN.....	119
4.1.2 <i>ASEAN Maritime Forum</i>	121
4.1.3 <i>ASEAN Maritime Strategic Partnership (AMSP)</i>	123
4.1.4 Pandangan ASEAN Terhadap Kerja Sama Maritim dengan Tiongkok.....	126
4.1.5 <i>ASEAN Maritime Naval Exercise</i>	129
4.2 Implementasi Kerjasama Maritim.....	131
4.3 Pengaruh Kerja Sama Maritim ASEAN Terhadap Laos Sebagai Satu-Satunya Negara <i>Landlocked</i> di Kawasan Tersebut.....	134
BAB 5 KESIMPULAN.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN.....	142

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengikuti peristiwa berpisahanya Singapura menjadi sebuah negara independen atau merdeka atas Malaysia pada Tahun 1965 silam, secara resmi Singapura juga baru pertama kali membuka hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia terhitung efektif sejak Tanggal 7 September 1967 silam atau pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Singapura saat itu Lee Kuan Yew dan Presiden RI ke-2 Soeharto atau bertepatan pada masa Rezim Orde Baru. Yang sekaligus berarti pada masa itu, kedua negara sudah langsung memiliki bangunan gedung kedutaan besar atau kantor perwakilan diplomatiknya masing-masing pada kurun waktu tersebut. Kemudian selama lebih dari 55 Tahun menjalin hubungan diplomatik bilateral tersebut, Indonesia dan Singapura juga sudah pernah melewati cukup banyak dinamika yang sekaligus mempengaruhi hubungan bilateral mereka selama ini termasuk diantaranya Peristiwa Serangan Gedung MacDonald House oleh Sersan Dua Usman Janatin Bin Haji Mohd Ali dan Kopral Dua Harun Tohir Bin Mandar pada penghujung Tahun 1965 silam sekaligus sebagai bagian dari Konfrontasi Semenanjung Melayu pada masa itu.

Peristiwa konfrontasi itu juga terjadi ketika dominasi atas kolonialisme Inggris masih berlangsung di sana dan Indonesia saat itu menganggap ini sebagai bagian dari model baru penjajahan yang harus segera diruntuhkan. Maka oleh karena itulah, kemudian Serda Usman dan Kopda Harun langsung pergi menyusup secara diam-diam dari Indonesia ke Singapura guna mensukseskan upaya penolakan dominasi atas kolonialisme Inggris tersebut. Saat baru pertama kali tiba di Singapura, awalnya Serda Usman dan Kopda Harun sempat merencanakan ingin megebom pipa saluran air pantai setempat. Namun rencana itu urung mereka lakukan jua lantaran itu malah justru bukan rencana awal mereka. Pergi ke tengah-tengah keramaian yang ada di pusat kota Singapura, Serda Usman dan Kopda Harun lalu menargetkan Gedung MacDonald House sebagai sasaran baru atas rencana pengeboman mereka pada saat itu mengingat gedung ini dahulu dihuni oleh banyak petinggi atau kaum elit Inggris di sana sehingga dengan demikian dapat disimpulkan kalau ini adalah simbol dari kejayaan kolonialisme

Inggris di Singapura pada saat itu. Berbekal bom dengan jenis bahan peledak Nitrogliserin, Serda Usman dan Kopda Harun lalu segera menaruh bomnya itu pada sejumlah titik rawan di sana dan kemudian segera saja pergi dari gedung itu.

Tidak butuh waktu lama, bom yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Serda Usman dan Kopda Harun itu lalu segera saja meledak di Gedung MacDonald House dengan menewaskan sebanyak tiga orang secara seketika dan melukai sebanyak 33 orang di sana pada sore hari itu juga. Mengetahui aksinya ini sukses membuahkan hasil, Serda Usman dan Kopda Harun segera bergegas pergi dari Singapura ke Indonesia. Namun dalam perjalanannya kembali ke tanah air inilah, mereka rupanya dapat segera ketahuan oleh aparat keamanan setempat yang lalu langsung menangkap dan menahannya sesuai ketentuan prosedur proses hukum setempat yang berlaku. Usai ini, hubungan Indonesia-Singapura pun diketahui sempat merenggang selama beberapa tahun karena gagalnya negosiasi antara pemerintah kedua negara sampai akhirnya Serda Usman dan Kopda Harun dieksekusi mati oleh Pemerintah Singapura akibat peristiwa pengebom Gedung MacDonald tersebut. Usai dieksekusi mati dan jenazahnya dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia, Serda Usman dan Kopda Harun kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional hingga sekarang. Usai itu terjadi, barulah kemudian Hubungan Indonesia-Singapura membaik sejak masa Rezim Orde Baru-sekarang.

Namun dalam perjalanannya, Hubungan Indonesia-Singapura pun masih sempat beberapa kali memburuk juga meskipun sejak era Rezim Orde Baru mereka sama-sama menjadi pencetus sekaligus anggota *Association of Southeast Asia Nations* atau ASEAN. Terutama setelah berlangsungnya era Reformasi sejak Tahun 1998 silam, dan secara khususnya lebih spesifik lagi pada masa Pemerintahan SBY sejak Tahun 2004 hingga 2014 silam dan Presiden Joko Widodo sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Pada masa jabatan dua Presiden RI yang secara langsung dipilih oleh rakyatnya ini pada sepanjang perjalanan sejarah, secara umum Hubungan Indonesia-Singapura memang dapat dikatakan relatif baik dalam artian tidak ada peristiwa atau gejolak-gejolak tertentu yang pernah terjadi seperti Peristiwa Pengeboman Gedung MacDonald House sebelumnya pada Tahun 1965 silam. Hanya saja,

kebetulan sekali memang pernah terjadi sejumlah peristiwa lainnya yang sempat mempengaruhi Hubungan Indonesia-Singapura pada masanya itu.

Untuk konteks saat ini, diawali pada masa Pemerintahan SBY, satu hal yang sempat membuat Hubungan Indonesia-Singapura renggang adalah pembahasan mengenai *Defence Cooperation Agreement* atau DCA. Untuk diketahui, perjanjian kerja sama pertahanan ini pun sebenarnya memang sudah pernah mulai dibahas oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sejak Tahun 2005 silam ketika Indonesia baru saja diguncang oleh Peristiwa Bom Bali II. Kala itu, Presiden RI ke-6 SBY pun kebetulan memang ditantang oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk membuat DCA sebagai versi paralel baru atas perjanjian terdahulu yakni perjanjian pertahanan yang sudah kadaluarsa sejak Tahun 2003 silam. Serta Pemerintah Indonesia di SBY pun menyetujuinya dan langsung mulai membahas hingga tahun-tahun selanjutnya.

Akan tetapi sampai hampir dua tahun kemudian yakni pada pertengahan Tahun 2007 silam, pembahasan mengenai Perjanjian DCA ini rupanya berjalan dengan alot sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) saat itu Juwono Sudarsono. Penyebabnya yakni karena Singapura menaikkan permintaan *Implementing Agreement* (IA) di dalamnya sekaligus berupaya menggagalkan perjanjian ekstradisi dan dengan klaim tersebut, Singapura meminta waktu selama 15 hari atau dua pekan berturut-turut untuk dapat menggelar latihan militer setiap bulannya sekaligus untuk menurunkan permintaan dalam negosiasi atas perjanjian ekstradisi. Perjanjian yang ini sendiri berisi permintaan Pemerintah Indonesia kepada Singapura agar mau memulangkan para koruptor yang dicurigai bersembunyi di sana sejak era Skandal BLBI pada tahun 1997 hingga 2001 silam. Sebelum itu pada saat bersamaan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura rupanya sudah sempat menyetujui lokasi latihan militer bersama walau harus ada persyaratan agar Singapura setuju atas perjanjian ekstradisi. Pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi kalau disetujui, namun pelaksanaannya belum tentu berjalan mulus. Sebab di sana banyak juga orang asing yang menyimpan uang panas dan Singapura tak mau kehilangan citranya sebagai negara bersih kendati demikian.

Terakhir lanjut Menhan Juwono Sudarsono pada saat itu juga, Pemerintah Indonesia tetap bertahan pada posisinya agar sampai Singapura mau menyetujui perjanjian tersebut sambil terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) untuk terus menghadapi permintaan Singapura tersebut melalui cara *total football diplomacy* ala Belanda, memungkinkan setiap aktor (setara dengan pemain sepakbola) bermain sambil berputar-putar namun tetap pada posisinya masing-masing. Yang jelas, Singapura juga tetap ingin menjaga citranya sebagai negara yang bersih dan bebas dari segala jenis bentuk korupsi.¹

Kemudian memasuki awal Tahun 2008, Menhan Juwono Sudarsono pun menganggap secara *de-facto* Perjanjian DCA ini akhirnya sudah resmi dibatalkan oleh Pemerintah Indonesia lantaran pada saat itu beliau dan SBY menilai ini sudah bukan lagi prioritas karena Pemerintah Singapura juga tetap tidak mau menyetujui Perjanjian Ekstradisi disana walau ini juga masih belum bisa dipastikan. Hanya Pemerintah Singapura sama sekali terlihat tidak berniat ingin merumuskannya lagi termasuk untuk DCA dan perjanjian kerja sama latihan militer kedua negara. Perumusan ulang hanya bisa terjadi kalau DCA dan Perjanjian Ekstradisi dipisahkan menjadi dua jenis perjanjian yang berbeda serta kegagalan pencapaian perjanjian ini pun tidak serta merta dapat dianggap sebagai kegagalan Pemerintah Indonesia mengingat adanya tujuan mengembalikan dana yang sempat dibawa kabur keluar ke sana dan perjanjian pun jelas membutuhkan sebuah kesepakatan bersama untuk nanti dibahas lagi dengan Lingkup Internal Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).²

Namun kendati demikian, pada saat itu Pemerintah Singapura tetap menjunjung tinggi komitmen penuhnya atas *DCA* dan Perjanjian Kerjasama Ekstradisi sebagaimana bunyi isi pernyataan mereka melalui surat dari Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta kala itu. Pemerintah

¹ Detik.com. 2007. "Negosiasi DCA Antara Indonesia dan Singapura Macet." <https://news.detik.com/berita/d-800671/negosiasi-dca-antara-indonesia-dan-singapura-macet->. Diakses 6 April 2023 Pukul 09.25 WIB.

² Kompas.com. 2008. "DCA Indonesia-Singapura Bukan Prioritas." <https://nasional.kompas.com/read/2008/02/04/21240439/dca.indonesia-singapura.bukan.prioritas>. Diakses 6 April 2023 Pukul 09.35 WIB.

Singapura menyesalkan pernyataan Menhan Juwono Sudarsono itu tadi yang dinilai sangatlah tidak berdasar dan menyesatkan tersebut. Adapun kendati demikian, sebagai tambahan informasi Pemerintah Singapura tetap menunggu kesiapan Indonesia yang mungkin memerlukan lebih banyak waktu sampai lebih siap lagi, terlebih Penyatuan DCA dan Perjanjian Kerjasama Ekstradisi sebelumnya juga sudah disepakati oleh SBY dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebagai keputusan bersama Kabinet Singapura pada Bulan Oktober 2005 silam.³

Berikutnya dengan dilansir dari berbagai sumber, lima tahun berselang yakni di 2013 atau setelah SBY hampir menggenapi dua periode masa jabatannya selama 10 Tahun, masalah lainnya muncul lagi dan sempat mengganggu Hubungan Indonesia-Singapura. Kali ini Hubungan Indonesia-Singapura renggang akibat kabut asap. Untuk diketahui, saat itu kabut asap bermunculan dari Indonesia khususnya di Provinsi Riau akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang kemudian lantas menarik perhatian nasional. Bahkan ini juga sampai turut sekaligus menarik perhatian internasional karena kabut asapnya itu sendiri sudah sampai masuk ke Singapura. Mengikuti keluhan yang disampaikan oleh Pemerintah Singapura pada saat itu, dalam keterangan pers terbarunya di waktu tersebut SBY lalu menyampaikan permohonan maafnya kepada mereka sambil menyatakan bertanggung jawab penuh atas musibah tersebut sekaligus memperingatkan agar pemberitaan di media Singapura tidak menyudutkan Indonesia karena tantangan yang dihadapinya pun tidak mudah walau kemudian Pemerintah Singapura mengapresiasi penanganan cepatnya juga.

Berganti pemerintahan dari SBY kepada Presiden Joko Widodo di Tahun 2014 silam, menurut penulis kali ini Hubungan Indonesia-Singapura dapat dikatakan sudah berada pada fase yang jauh lebih baik lagi ketimbang sebelumnya walau masalah serupa seperti di Era SBY masih juga sempat terjadi pada saat itu yakni Kabut Asap Tahun 2015, 2019 dan 2023. Namun kendati demikian, di luar bencana Kabut Asap Tahun 2015, 2019 dan 2023 tersebut, Indonesia dan Singapura pada masa Pemerintahan

³Kompas.com. 2008. "Singapura Tetap Berkomitmen pada Paket DCA dan ET." <https://megapolitan.kompas.com/read/2008/02/08/1812358/singapura-tetap-berkomitmen-pada-paket-dca-dan-et> . Diakses 6 April 2023 Pukul 09.45 WIB.

Presiden Jokowi serta Perdana Menteri Lee Hsien Loong dapat fokus kepada sejumlah kerja sama baik itu di isu ekonomi, pertahanan, stabilitas kawasan, bantuan kemanusiaan dan lain-lain sebagainya. Terutama untuk isu bantuan kemanusiaan sebagaimana akan dibahas dalam tesis ini.

Bukti menguatnya kerjasama isu bantuan kemanusiaan di era Presiden Jokowi ini sejatinya sudah terbukti sejak awal masa pemerintahannya pada 2014 silam. Ketika itu di penghujung Bulan Desember 2014, Indonesia sempat dihebohkan dengan kejadian jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501 ketika pesawat itu masih dan juga sedang menempuh perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Singapura dengan membawa sebanyak 162 orang terdiri atas 155 penumpang dan 7 awak. Sebelum resmi dinyatakan jatuh di Wilayah Perairan Selat Malaka, pesawat naas ini pun sempat terpantau melangsungkan kontak dengan radar Menara Pengawas Udara Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka untuk meminta naik ketinggian demi menghindari gumpalan Awan Cumulonimbus sebagaimana pada saat itu awan tersebut menghalangi jalur penerbangannya.

Sedangkan sisanya di periode 2015-2019, Mayoritas bentuk bantuan asing yang diberikan oleh Singapura kepada Indonesia adalah untuk penanggulangan bencana alam. Lalu di 2020 menjadi untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 dan di 2021 untuk evakuasi KRI Nanggala 402. Enam tahun berselang yakni pada awal Tahun 2021, sebagaimana yang akan penulis bahas dalam tesis ini, kerja sama seputar isu bantuan asing atau internasional antara Indonesia dan Singapura terjadi lagi. Kali ini isunya adalah Evakuasi KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara ketika sedang mengikuti agenda kegiatan latihan perang. Begitu armada kapal selam andalan TNI AL tersebut dinyatakan hilang, permohonan bantuan asing lalu segera saja berdatangan termasuk di antaranya yang dari Singapura berupa Kapal MV Swift Rescue dan ROV-nya yang kemudian berhasil menemukan KRI Nanggala 402 di kedalaman 838 Meter walau sudah dalam keadaan tenggelam.

Khusus untuk contoh kasus KRI Nanggala 402, Dalam tesis ini contoh kasus demikian dapat digolongkan sebagai salah satu dari sekian banyak kerja sama maritim yang pernah atau sedang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura saat ini. Dengan mengacu kepada peristiwa lainnya yang saat

ini juga tengah terjadi di antara/sekitar Indonesia dan Singapura, Maka dengan demikian sampai sejauh ini penulis dapat menyimpulkan bahwa garis besar dari pembahasan dalam seluruh Tesis ini adalah kerja sama maritim antara Indonesia dan Singapura terutama dalam Konteks Evakuasi KRI Nanggala 402 tentunya di samping peningkatan ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, Hadirnya AUKUS, Patroli Bersama, Latihan Gabungan dan sejumlah kerja sama pertahanan maritim lainnya yang pernah atau tetap sedang melibatkan Indonesia dan Singapura.

Kemudian terakhir sebagai penutup dari bagian Latar Belakang Masalah, dengan ini penulis ingin juga menyampaikan bahwa uraian dari contoh-contoh kasus tersebut nantinya akan menjadi bahasan utama dari tesis ini yakni isu-isu mengenai bantuan kemanusiaan berdasarkan penjelasan dari sudut pandang Teori *Regional Security Complex*.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada dini hari tanggal 21 April 2021 sekitar Pukul 02.30 WITA, dengan mengangkut sebanyak 53 orang awak, KRI Nanggala 402 bersiap-siap untuk memulai kegiatan latihan perang dengan cara menembakkan torpedonya di bawah permukaan air Laut Bali Utara sebagai lokasi latihan perangnya itu. Menurut keterangan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) saat itu Laksamana Yudo Margono (kini beliau sudah menjadi Panglima TNI), pada Pukul 02.30 WITA tersebut tahapan kegiatan latihan perang yang dimulai adalah terbit atau baru berawalnya semua tahapan demi tahapan kegiatan latihan perang tersebut. Baru dalam setengah jam berselang yakni Pukul 03.00 WITA, KRI Nanggala 402 mengajukan izin untuk menyelam pada kedalaman 13 Meter dalam rangka melakukan persiapan menembak torpedo. Menyesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku, setiap kali menyelam dan menembak torpedo itu setiap kapal selam tanpa terkecuali KRI Nanggala 402 akan selalu didampingi oleh *sea rider* penjejak dari unsur satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska, grup penyelam handal dari TNI Angkatan Laut.

Kemudian nantinya ketika senjata torpedo sudah diluncurkan, pasukan *sea rider* penjejak dari unsur satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut tersebut akan langsung

mengikuti. Ketika itu berdasarkan keterangan Laksamana Yudo Margono, geladak haluan dan *conning tower* KRI Nanggala 402 masih terlihat oleh pasukan *sea rider* penjejak dari Kopaska TNI AL sampai pada jarak 50 Meter. Setengah jam berselang yakni pada Pukul 03.30 WITA, unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang lain sebagaimana mereka turut terlibat aktif dalam kegiatan latihan perang ini pun memeriksa *torpedo warning* dan unsur lain sudah siap meluncurkan torpedo. Namun hanya dalam kurang-lebih 15 Menit berselang yakni sekitar Pukul 03.46 WITA, pasukan *sea rider* Kopaska TNI AL memonitor bahwa periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala 402 perlahan mulai menyelam tanpa terlihat lagi. Kemudian dalam satu jam berikutnya sejak Pukul 03.46 WITA hingga 04.46 WITA dimana saat itu waktu tersebut seharusnya menjadi jadwal penembakan atau peluncuran torpedo, KRI Nanggala 402 terus mendapat kontak namun diketahui tidak pernah merespon lagi. “Harusnya saat tenggelam tadi, masih ada periskop pasti kelihatan. Ini tak ada periskop dan komunikasi saat itu tidak terjalin.” Ujar Laksamana Yudo Margono saat itu.

Serta pada kurun-rentang waktu inilah KRI Nanggala 402 pun seharusnya sudah langsung bisa mengajukan otorisasi untuk melangsungkan penembakan atau peluncuran torpedo hanya saja sekalipun terjadi proses pemanggilan kepada KRI Nanggala 402 untuk diberikan otorisasi guna melangsungkan penembakan atau peluncuran torpedo, kapal selam andalan TNI AL tersebut juga sama sekali tidak pernah merespon apapun lagi. Maka oleh karena itulah selanjutnya pada Pukul 04.17 WITA TNI AL memutuskan untuk langsung menerbangkan salah satu armada helikopternya dari KRI I Gusti Ngurah Rai guna melakukan deteksi visual secara langsung di lapangan, namun hasilnya tetap sama saja nihil alias helikopternya juga tidak melihat apa-apa di sana. Padahal seharusnya dalam satu jam berselang yakni Pukul 05.15 WITA, KRI Nanggala 402 dijadwalkan sudah timbul atau naik lagi ke permukaan air laut. Namun karena tidak juga kunjung naik ke permukaan air laut inilah maka kemudian TNI AL menyatakan prosedur *sublook* kepada KRI Nanggala 402. Untuk diketahui, prosedur *sublook* diberlakukan apabila terdapat suatu kapal selam yang mengalami hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan sesuai prosedur yang berlaku.

Setelah tiga jam proses pencarian yakni pada Pukul 06.46 WITA TNI AL segera mengubah status hilang kontaknya KRI Nanggala 402 dari sebelumnya *sublook* menjadi *submiss* atau kapal selam yang benar-benar sudah hilang kontak sehingga membuat seluruh unsur KRI yang mendapat tugas pengamanan di luar jadi harus langsung terlibat pencarian dan kegiatan latihan perang otomatis ditunda. Selama empat hari berselang sejak kapal selam tersebut dinyatakan hilang kontak, seluruh Anggota Tim Pencari dari Unsur TNI AL, Polri dan Basarnas sebagai tim gabungan melakukan penyisiran dan pencarian di sekitar lokasi hilang kontaknya KRI Nanggala 402.

Petunjuk kemudian segera didapatkan oleh para unsur anggota tim gabungan tersebut berupa ditemukannya tumpahan minyak dan tanda-tanda magnetik yang cukup besar di sekitar wilayah perairan Celuk Bawang bersama sejumlah objek yang merupakan bagian dari KRI Nanggala 402 berupa pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, botol *orange* pelumas periskop kapal selam, Alat Shalat Milik Awak KRI Nanggala 402 yang Memeluk Agama Islam dan spons atau busa penahan rasa panas pada *pressroom*. Usai ditemukan semua barang atau benda-benda bagian dari KRI Nanggala 402 itulah maka kemudian pada hari keempat pencarian, TNI AL segera mengubah status kehilangan kontak KRI Nanggala 402 dari *submiss*, *sublook* menjadi *subsunck* atau kapal selam yang diduga kuat sudah benar-benar tenggelam di sekitar lokasi hilang kontaknya tersebut, saat itu kemungkinan pada kedalaman 850 Meter di bawah permukaan air laut.⁴

Kemudian sebagai bentuk *immediate respond* atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara ini, usai bukti-bukti otentik tersebut ditemukan oleh unsur tim gabungan pencari dan penyelamat, masih pada hari yang sama juga TNI Angkatan Laut segera menyatakan *distress call* atau panggilan darurat (permintaan tolong segera) kepada *International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer* (ISMERLO) sebagaimana itu merupakan sebuah organisasi internasional di bawah *Northern Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sesuai prosedur yang berlaku di wilayah setempat, usai

⁴Kompas.com. 2021. "Kronologi Tenggelamnya KRI Nanggala-402, Berawal dari Latihan Perang." [https://regional.kompas.com/read/2021/04/25/094512378/kronologi-tenggelamnya-kri-nanggala-402-berawal-dari-latihan-perang?page=all#:~:text=Tenggelamnya%20KRI%20Nanggala%2D402%20diawali,4%2F2021\)%20dini%20hari..](https://regional.kompas.com/read/2021/04/25/094512378/kronologi-tenggelamnya-kri-nanggala-402-berawal-dari-latihan-perang?page=all#:~:text=Tenggelamnya%20KRI%20Nanggala%2D402%20diawali,4%2F2021)%20dini%20hari..) Diakses 3 Maret 2023 Pukul 05.45 WIB.

mendapatkan permintaan tolong segera dari Indonesia melalui TNI AL tersebut, ISMERLO pun kemudian segera memerintahkan sejumlah negara anggotanya terutama atau negara mitranya yang berada dekat dengan Indonesia untuk segera mengirimkan pertolongan atau bantuan internasional ke lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Diantaranya negara-negara yang mengirimkan pertolongan atau bantuan internasional ke lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 tersebut adalah Singapura, Malaysia, India, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat atau AS. Keenam negara yang juga merupakan negara mitra penting atau strategis sekaligus sahabat baik Indonesia sejak lama ini pun mayoritas mengirimkan armada angkatan laut mereka berupa kapal perang, kapal pelacak/pencari, kapal penyelamat hingga bantuan medis militer internasional ke Indonesia saat itu kecuali Amerika Serikat atau AS yang hanya sebatas mengirimkan Pesawat Poseidon P-8 (Pelacak/Pencari).

Berdasarkan uraian kronologis tersebut, salah satu alasan mengenai sesuatu yang lebih bahkan paling faktual sekaligus menarik perhatian penulis sebagai peneliti dalam bagian Identifikasi Masalah di tesis ini adalah adanya perjanjian kerja sama evakuasi kapal selam antara Indonesia dan Singapura yang sudah ditandatangani sejak Tahun 2012 silam. Diketahui, perjanjian ini ditandatangani oleh kedua negara terutama ketika Indonesia masih dipimpin oleh SBY. Namun mengenai siapakah sosok yang menandatangani perjanjian tersebut, sampai sekarang penulis pun sama sekali masih belum mengetahuinya apakah SBY itu sendiri bersama PM Singapura Lee Hsien Loong, Panglima TNI saat itu Laksamana Agus Suhartono bersama Panglima Angkatan Bersenjata Singapura atau Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) TNI saat itu Laksamana Soeparno dan KSAL Singapura saat itu juga. Kendati demikian, terlepas dari siapakah sosok yang menandatangani perjanjian tersebut, sampai sejauh ini penulis merasa kalau itu dapat menjadi isu yang paling menarik perhatian penulis sekaligus sebagai peneliti dalam tesis ini.

Dalam dokumen tersebut, tertuang sejumlah poin kesepakatan bersama antara Indonesia dan Singapura berupa:

1. Didirikannya sebuah kerangka kerja sama pertahanan penyelamatan kapal selam antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura, sekaligus menegaskan ulang kerja sama tersebut melalui pertukaran perwira dan latihan bersama,
2. Dukungan kepada upaya penyelamatan dengan akan didirikannya prosedur aktivasi efektif antar-otoritas operasional kapal selam angkatan laut kedua negara,
3. Armada penyelamatan kapal selam Angkatan Laut Singapura berupa Kapal MV Swift Rescue dan Wahana Penyelam *Deep Search and Rescue Six* akan selalu tersedia untuk mendukung kelancaran evakuasi kapal selam di TNI Angkatan Laut⁵,
4. Kesepakatan untuk memperkuat kemampuan operasi bersama atau interoperabilitas.

Sekali lagi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pada paragraf pembuka di atas terlebih dahulu, terlepas dari tidak adanya informasi mengenai persisnya siapakah sosok yang memprakarsai sekaligus menandatangani dokumen perjanjian tersebut, mau bagaimanapun juga menurut penulis setidaknya sampai sejauh ini dokumen perjanjian tersebut dapat dijadikan kerangka acuan untuk penelitian dalam tesis ini yang kebetulan juga membahas topik mengenai Peristiwa Evakuasi KRI Nanggala 402 sebagai Titik tolak atas Kerja Sama Maritim ASEAN serta pengiriman dan penerimaan bantuan asing internasional dari negara-negara sahabat termasuk di antaranya Singapura sebagaimana akan diulas dalam poin-poin selanjutnya sebagai berikut ini.

1.3 Pembatasan Masalah

- a. Isu penelitian utama dalam tulisan tesis ini adalah bantuan internasional/asing yang tidak selalu berupa uang/finansial setiap kali diberikan oleh suatu negara yang memilikinya kepada negara lain yang membutuhkannya. Contoh nyata atau riilnya adalah bantuan evakuasi kapal selam yang diberikan oleh Singapura kepada Indonesia saat KRI Nanggala 402 baru saja tenggelam

⁵ Andita Rahma, Zacharias Wuragil. Tempo.com. 2021. "Ini Sebab Singapura Bergerak Cari Kapal Selam KRI Nanggala 402." <https://tekno.tempo.co/read/1455148/ini-sebab-singapura-bergerak-cari-kapal-selam-kri-nanggala>. Diakses 3 Maret 2023 Pukul 06.50 WIB.

tersebut. Untuk diketahui, bantuan yang diberikan oleh Singapura kepada Indonesia pada saat itu kebetulan sekali tidak dalam bentuk uang atau dukungan finansial, melainkan langsung bantuan kemanusiaan berupa pengiriman armada pencari, pelacak dan penolong kapal selam dari Pasukan Angkatan Laut Singapura (*Republic of Singapore Navy, RSN*). Armada tersebut terdiri atas Kapal MV Swift Rescue dan alat *Remotely Operated Vehicle (ROV)* lengkap dengan pasukan prajurit dan segala kemampuan terbaiknya.

- b. Sedangkan Aktor-aktor yang terlibat dalam misi ini adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Singapura, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura (*Republic of Singapore Navy/RSN*) yang secara langsung terlibat dalam Misi Evakuasi sekaligus merangkap Pencarian dan Pertolongan KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara pada 2021 silam. Menyesuaikan dengan apa saja yang sebelumnya sudah pernah penulis jelaskan di sini, ketika TNI Angkatan Laut baru saja secara resmi menyatakan KRI Nanggala 402 mengalami hilang kontak di tengah-tengah berlangsungnya agenda kegiatan latihan perang di Laut Bali Utara, TNI Angkatan Laut lalu menghubungi sejumlah negara-negara sahabat Indonesia untuk meminta pertolongan-pencarian termasuk Singapura dengan Kapal MV Swift Rescue-nya yang kemudian berhasil menemukan KRI Nanggala 402 walau sudah kondisi tenggelam dan terbelah menjadi tiga bagian di dasar Laut Bali Utara.
- c. Insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini terjadi pada kurun-rentang waktu 21 April Hingga Mei 2021. Peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini menjadi momentum kerja sama maritim di Kawasan Asia Tenggara sekaligus menyikapi situasi di Laut Tiongkok Selatan.

1.4 Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Jika ditarik mundur lagi sampai jauh ke belakang yakni antara 10 hingga 15 Tahun sebelum terjadi insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402, salah satu alasan kuat yang dapat dijadikan *research gap* dalam tesis ini adalah ditandatanganinya dokumen perjanjian kerja sama evakuasi kapal selam oleh Indonesia dan Singapura sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal sebelumnya. Menurut penulis,

dokumen perjanjian tersebut sampai sejauh ini dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka acuan dalam tesis ini dengan melihat bahwa secara umumnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura selama ini pun selalu berada dalam keadaan atau kondisi yang sangat baik dalam artian sedang tidak ada peristiwa atau gesekan-gesekan mengenai sentimen tertentu dengan pengaruhnya terhadap hubungan mereka. Adapun satu hal yang dirasa atau dinilai masih kurang dari Indonesia, paling jauh hanyalah sebatas kurangnya kekuatan armada penyelamat kapal selam yang sampai sejauh ini pun sama sekali masih belum pernah dimiliki oleh Indonesia terutama TNI AL padahal identitas Indonesia itu sendiri adalah negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Hanya saja untuk yang ini, penulis masih belum mengetahui apakah ini benar-benar menjadi alasan kuat Indonesia menjalin kesepakatan kerja sama mengenai hal tersebut dengan Singapura ataukah sebaliknya malah justru tidak dan bukan sama sekali.

Sehingga dengan demikian, sampai sejauh ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanyaan penelitian atau *research question* yang paling tepat adalah:

“Bagaimana Kerjasama Indonesia-Singapura dalam penanganan tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadi titik tolak kerjasama maritim Negara-Negara Anggota ASEAN?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini memiliki tujuan untuk menganalisis kerja sama Indonesia-Singapura dalam penanganan tenggelamnya KRI Nanggala 402 sekaligus kerja sama maritim Negara ASEAN.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaannya, semoga dengan dilaksanakan dan diterbitkannya hasil penelitian ini nanti dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin membahas hal serupa, dasar kerangka acuan bagi para *stakeholders* untuk mengambil kebijakan terkait kapal selam dan bisa berkontribusi secara lebih

maksimal lagi dalam diskusi tentang kerja sama/diplomasi pertahanan/maritim sekaligus dengan memunculkan sudut pandang/isu baru dalam konteks penelitian diplomasi pertahanan/maritim.

1.6 Kajian Literatur

Penulisan tesis ini nantinya akan dilangsungkan dengan mengikuti sistem kajian literatur yang nantinya juga akan mengikuti sebanyak lima tulisan artikel jurnal yang terkait sebagai berikut.

1.6.1 Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan *Daewoo Shipbuilding Marine Engineering* dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan *Minimum Essential Force* Militer Republik Indonesia (Wawan Budi Darmawan. Jafar Alkadrie. Arfin Sudirman. Departemen Studi Hubungan Internasional. Universitas Padjadjaran. 2020.)

Tulisan artikel jurnal terbitan *platform* jurnal milik *Padjadjaran Journal of International Relations* (Padjir, Universitas Padjadjaran) ini jika ditinjau dari keseluruhan konten atau isinya lebih banyak membahas tentang agenda program kerjasama militer Indonesia dan Korea Selatan melalui perantaranya yakni Kementerian Pertahanan dan Perusahaan Jasa Teknik Konstruksi Perkapalan *Daewoo Shipbuilding Marine Engineering* atau yang seringkali lebih dikenal sebagai DSME. Pembahasan diawali dengan ulasan panjang-lebar sang penulis mengenai letak posisi Indonesia yang strategis secara geografis dan geopolitik berdasarkan jumlah personel militer (Anggota TNI) aktif sebanyak 107,5 Juta Orang serta kebutuhan atas modernisasi alat-alat utama sistem pertahanan (alutsista) berdasarkan kerangka konsep pemikiran yang dituangkan di sini, termasuk diantaranya yakni *Military Industrial Complex* dengan lebih mendekatkan hubungan antara pemerintah dan industri pertahanan atau militer sebagaimana ide ini dahulu pernah digagas oleh Presiden Amerika Serikat ke-34 Dwight D. Eisenhower (1953-1961) dan juga *The Iron Triangles* yang menggambarkan hubungan antara Pemerintah (dalam hal ini adalah Pentagon/Kementerian Pertahanan Amerika Serikat) dengan Kongres/Parlemen Amerika Serikat dan Industri Pertahanan Amerika Serikat.

Serta konsep yang paling utama dalam tulisan artikel jurnal ini adalah *Maritime Security* atau Keamanan Maritim sebagai istilah terbaru dalam Isu-Isu Seputar Hubungan Internasional. Aktor

utamanya adalah tata kelola laut dan keamanan internasional, merujuk pada sejumlah jenis ancaman yang sewaktu-waktu mungkin saja dapat muncul di wilayah perairan laut. Dari sekian banyak konsep yang terdapat dalam hal ini, ada sebanyak empat unsur utama yang dikembangkan yakni *sea power*; keamanan laut, *blue economy* dan ketahanan manusia sekaligus dengan membedakannya dari konsep *Maritime Safety* atau Keselamatan Maritim. Keamanan Maritim mencakup perdamaian internasional dan keamanan nasional, keamanan laut di garis komunikasi, perlindungan dari kejahatan untuk keamanan di laut, keamanan sumber daya seperti akses ke laut dan di dasar laut, perlindungan melalui lingkungan hidup dan kebutuhan keamanan bagi pelaut serta nelayan. Semuanya dikaitkan dengan kondisi geografis, geopolitik dan geomaritim Indonesia yang juga masih perlu dibenahi dari banyak sektor terutama dalam hal soal jumlah alutsista (mencakup diantaranya kapal selam) untuk dapat mencapai tingkat *Minimum Essential Force* atau MEF di masa mendatang.

Mayoritas alutsista yang dimiliki oleh Indonesia atau dalam hal ini adalah Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diketahui sudah berusia tua lebih dari 20 bahkan 30 tahun sejak awal masa operasionalnya dahulu kala. Alutsista-alutsista yang usianya diketahui sudah tua itu pun masih mencakup armada kapal selam di TNI Angkatan Laut sehingga oleh karena itulah sejak beberapa tahun belakangan ini bahkan lebih dari 10 Tahun silam ketika Pemerintahan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional (RPJMPN) 2010-2014, pada saat bersamaan Pemerintah Indonesia pun tidak ketinggalan sudah mengalokasikan anggaran sekian ratus milyar-triliun Rupiah untuk tujuan melakukan modernisasi alutsista milik TNI termasuk di antaranya armada kapal selam TNI Angkatan Laut selain kebutuhan alutsista jenis lainnya untuk TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat. Kemudian untuk diketahui, upaya pengadaan modernisasi alutsista tersebut pun sebenarnya juga terbagi menjadi dua fase berikutnya dalam RPJMPN yakni Fase/Periode 2015-2019 dan 2020-2024.

Lebih spesifiknya lagi, jenis-jenis alutsista yang akan segera dimodernisasi dalam kedua fase RPJMPN itu juga tidak lupa mencakup armada kapal selam. Jenis alutsista ini tergolong sebagai yang sangat krusial untuk segera dimodernisasi mengingat kebutuhan sekaligus tujuan untuk mewujudkan

postur pertahanan militer yang ideal seiring meningkatnya kapasitas industri pertahanan jadi ke level global sekaligus dengan mengingat bahwa di tingkat kawasan atau regional Asia-Pasifik, sebagian besar negaranya dikelilingi oleh wilayah perairan laut sehingga oleh karena itulah mereka jadi akan sangat membutuhkan pasukan angkatan laut yang mampu menjaga alur laut terbuka menggunakan peralatan dan sistem modern termasuk kapal selam. Kapal selam memiliki peranan penting dalam strategi pertahanan karena posisinya yang sulit diketahui dan dihancurkan oleh musuh ketika sedang dalam misi penyelaman, peperangan atau pertempuran di bawah permukaan air laut. Dulu, pengadaan kapal selam di kawasan atau regional Asia-Pasifik sempat dianggap tidak penting namun sekarang tidaklah demikian mengingat tingginya biaya operasional dan kurangnya pemahaman kapal selam.

Sedangkan di era modern saat ini, kapal selam jadi berperan sangat penting harganya relatif terjangkau untuk mengoperasikannya terutama yang berjenis diesel listrik mengikuti mayoritas pilihan negara-negara di kawasan atau regional Asia-Pasifik sesuai kapasitas ekonomi dan anggaran sumber daya mereka untuk memperkuat sistem pertahanan mereka. Kecuali India dan Tiongkok, sampai saat ini keduanya menjadi contoh dari sekian banyak negara-negara di kawasan atau regional Asia-Pasifik ini yang sudah mengoperasikan jenis armada kapal selam nuklir untuk menunjukkan soal negara manakah yang pasukan angkatan lautnya yang dapat mengikuti perkembangan kemampuan maritimnya. Sementara itu berikutnya dalam konteks industri kapal selam dan perkapalan secara umumnya di kawasan atau regional Asia-Pasifik ini bahkan khususnya konteks tatanan geopolitik Asia Timur, Korea Selatan menjadi salah satu negara maju yang memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sektor industri pertahanan akibat sejak meletusnya perang di Semenanjung Korea inilah puluhan tahun silam, Korea Selatan menyadari betul soal siapakah musuh paling nyatanya yakni Korea Utara sehingga hal ini pun sekaligus membuatnya jadi negara pengembang sektor industri terbesar dan paling serius kedua setelah Tiongkok.

Sistem sektor industri pertahanan di Korea Selatan ini pun mendapatkan kebijakan insentif fiskal dari pemerintah setempat guna memacu pertumbuhan dan pengembangan penguasaan teknologi pertahanan nasional. Kemudian dalam konteks sistem sektor industri pertahanan Indonesia, sampai

sejauh ini jurnal mencatat bahwa rekam jejak (*track record*)-nya masih belum baik untuk memenuhi tingkat kebutuhan alutsista dalam negeri meskipun sejak dulu sudah ada PT. DI, PT. PAL dan PT. Pindad akibat tekanan politik dari negara berindustri maju menyusul serangkaian peristiwa pergolakan yang pernah terjadi di masa lalu. Maka oleh karena itulah, sejak beberapa tahun belakangan ini untuk memenuhi kebutuhan pengadaan armada kapal selam TNI Angkatan Laut—Pemerintah mencoba menggandeng sejumlah rekanan perusahaan galangan sistem konstruksi perkapalan dari luar negeri yang juga pernah tertarik bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia antara lain dari Rusia untuk pengadaan kapal selam kelas Kilo dan DCNS dari Perancis untuk pengadaan kapal selam kelas Scorpene. Namun dalam praktiknya, pilihan Pemerintah Indonesia kemudian jatuh kepada DSME dari Korea Selatan untuk pengadaan kapal selam kelas Changbogo.

Didasari oleh alasan berupa masih kurangnya tingkat kebutuhan armada kapal selam untuk TNI Angkatan Laut, pada akhirnya Pemerintah Indonesia memesan sebanyak tiga buah armada kapal selam dari DSME Korea Selatan sambil sekaligus mengajukan sebuah persyaratan yakni alih teknologi atau transfer teknologi (*ToT*) kepada PT. PAL di Surabaya, Jawa Timur sebagai lokasi dimana armada kapal selam ketiga nantinya akan diproduksi dengan terlebih dahulu mengutus tim peneliti dari Indonesia ke Korea Selatan dalam rangka untuk mempelajari teknologi produksi kapal selam dari yang pertama dan kedua sebagaimana itu terlebih dahulu diproduksi di Korea Selatan sebelumnya. Kontrak pemesanan ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan dan DSME di Jakarta pada akhir tahun 2011 silam dengan dana pembelian tiga kapal selam sebesar 1,07 Miliar Dolar AS. Lalu selain itu, kerja sama militer Indonesia dengan negara lain juga diketahui terjadi bersama Rusia untuk membeli kapal selam kelas Kilo yang memiliki efek *deterrence* dahsyat di kawasan namun bisa bergerak secara senyap, mengingat fungsinya sebagai kapal anti permukaan dan kapal selam. Rencananya kapal selam ini baru akan dipesan setelah kelas Changbogo selesai, melihat belum cukupnya jumlah total yang ditargetkan dan kemampuan persenjataannya yang lebih lengkap & baik.

Sedangkan alasan lain mengapa Pemerintah Indonesia jadi cenderung lebih memilih kapal selam kelas Changbogo adalah karena faktor pertimbangan dana dan kemenangan tender untuk ini di

sini. Kelas ini pun sesungguhnya merupakan pembaharuan dari kapal selam serupa buatan Jerman beberapa puluh tahun sebelumnya, hanya berbeda ukuran panjang lambung dibekali kemampuannya untuk dapat menembakkan rudal sub-harpoon Tipe AIP dan sistem akustik penangkal torpedo dan jenis torpedo kelas baru *White Shark (Baek Sang Eo Torpedo)*, rudal anti kapal permukaan *Hae Sung*. Terakhir sebagai kesimpulan, sekali lagi jurnal ini pun menegaskan bahwa dengan melihat status kondisi geografis Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan & negara maritim terbesar di dunia maka tingkat kebutuhan armada kapal selamnya nanti akan sangat besar & harus dipenuhi.⁶

1.6.2 *Maritime Diplomacy* Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia (Darurat Bencana/Keselamatan Maritim/Kapal Selam). Oleh: Muhammad Harry Riana Nugraha, Arfin Sudirman. Universitas Padjadjaran. 2016.

Sedangkan tulisan artikel jurnal berikutnya kali ini lebih menekankan pada aspek darurat bencana/keselamatan maritim (kapal selam). Tulisan artikel jurnal tersebut mengungkapkan bahwa aspek ini pun sebenarnya masih termasuk dalam bagian Konsep Keamanan Maritim yang dimana keduanya ini pun masih perlu dibedakan definisinya sebagai berikut:

- a. Keamanan Maritim sifatnya lebih cenderung merujuk kepada tindakan yang bersifat preventif dan responsif dalam rangka untuk melindungi wilayah maritim suatu negara dari ancaman keamanan maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya.
- b. Keselamatan Maritim sifatnya lebih cenderung menekankan kepada tindakan guna mencegah/mengurangi dampak dari kecelakaan/bencana alam seperti yang dikemukakan oleh Roell sebagai berikut:

⁶Wawan Budi Darmawan. Jafar Alkadrie. Arfin Sudirman. Departemen Studi Hubungan Internasional. Universitas Padjadjaran. 2020. "Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia *Daewoo Shipbuilding Marine Engineering* dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan *Minimum Essential Force* Militer Republik Indonesia." <http://jurnal.unpad.ac.id/padjar/article/view/25982/12735>. Diakses 7 Maret 2023 Pukul 09.50 WIB.

“Maritime Security... Which has no clear definitions when it comes to Maritime Security Operations... No universal legal or agreed definition due to the fact that it is a broad topic, covering many policy sectors.” (Roell et al, 2013:2).⁷

Kemudian berdasarkan uraian singkat tersebut, dalam tulisan artikel ini sampai sejauh ini secara pribadi penulis sendiri sejauh ini masih belum dapat menemukan bagian yang secara spesifik membahas tentang darurat bencana/keselamatan maritim khususnya untuk kaitannya dengan insiden kapal selam. Namun pembedaan jenis atau klasifikasi yang tadi juga sudah ditulis di sini pun sesungguhnya dapat sekaligus menjadi sebuah penekanan khusus terkait respon atas situasi darurat bencana khususnya bencana maritim yang secara langsung pernah terjadi dengan melibatkan armada kapal selam angkatan laut pada beberapa negara di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia melalui Peristiwa Tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara Pada Bulan April 2021 Silam. Dalam rangka membicarakan aspek ini, sampai sejauh ini saja kita sendiri pun sebenarnya juga sudah dapat menyimpulkan bahwa unsur keselamatan maritim pun sebenarnya jadi dinilai tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan keamanan maritim mengingat terdapat sebagian orang yang profesi atau pekerjaannya selalu memberikan banyak sekali tuntutan untuk beraktivitas di laut sehingga oleh karena itulah keselamatan mereka harus selalu diperhatikan melalui berbagai cara termasuk diantaranya yakni modernisasi alutsista (khusus bagi para Anggota Angkatan Laut) dan kesiapsiagaan pasukan penolong, pencari dan penyelamat beserta alat penunjangnya masing-masing.

1.6.4 *The Journal of Humanitarian Assistance: One step forward, two steps back? Humanitarian Challenges and Dilemmas in Crisis Settings* (Daniela Nascimento, University of Coimbra, Portugal)

Mengutip teori *humanitarian assistance* atau bantuan kemanusiaan dalam jurnal ini, ternyata komunitas internasional manusia itu sesungguhnya memang selalu berkonfrontasi dengan pertempuran militer, bencana alam dan situasi-situasi ekstrim lainnya yang sangat mengancam kehidupan sejak dulu

⁷ Muhammad Harry Riana Nugraha, Arfin Sudirman. “*Maritime Diplomacy* Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia.” <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11059>. Diakses 7 Maret 2023 Pukul 11.35 WIB.

hingga sekarang. Berdasarkan sejarahnya, semua jenis ancaman kehidupan bagi umat manusia tersebut selalu sudah mendorong komunitas internasional manusia untuk menyediakan akses terhadap jalur bantuan kemanusiaan guna menyelamatkan nyawa dan memastikan keamanan mereka. Khusus secara spesifik untuk era setelah berakhirnya Perang Dingin, perubahan situasi internal menyumbangkan pengaruh besar terhadap bantuan kemanusiaan dan sistem pertolongan darurat. Meskipun lebih kompleks, namun pada kenyataan hal itu masih tetap turut mempertegas pandangan teori klasik tentang *humanitarian assistance* yang menyatakan bahwa netralitas menjadi prioritas utama dalam merespon situasi sulit. Namun seiring berkembangnya zaman terutama setelah Perang Dingin berakhir, sejumlah perbedaan pandangan mengenai bantuan kemanusiaan mulai mempengaruhi definisi asli dari hal itu sendiri.

Aktor internasional besar (contohnya seperti Negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) dinilai akan lebih banyak memberikan intervensi berbasis pendekatan kepada bagian multidimensional dari konflik internal dan bantuan kemanusiaan sebagaimana itu mulai bangkit sejak Dekade 1990-an. Usai itu, teori ini rupanya dapat berkembang dengan maksimal sebagaimana contoh kasusnya yang pernah terjadi pada Peristiwa Serangan 11 September 2001 dengan dampak negatif dan problematis multidimensional kepada sektor politisasi, militersiasi, hak asasi manusia dan berkurangnya nilai-nilai atas pandangan klasik. Semua ini lalu menimbulkan banyak masalah baru nan penting serta dilemma yang jauh lebih kompleks untuk isu-isu kemanusiaan terutama aspek militer sebagaimana akan menjadi tonggak dari bahasan utama untuk tulisan tesis ini.

Meskipun peran militer dalam upaya penyaluran bantuan kemanusiaan itu sebenarnya memang sudah umum terjadi dimana-mana, namun masalah ini rupanya mengalami sejumlah peningkatan secara cukup signifikan sejak tahun 1990-an seiring meningkatnya peran dari aktor politik dalam isu-isu kemanusiaan. Dalam konteks ini, pasukan militer yang pastinya akan selalu berdiri di bawah komando dari pemerintahan suatu negara akan mendapatkan akses secara lebih banyak dan lebih luas untuk isu-isu seputar bantuan kemanusiaan.

Sedangkan satu hal lainnya yang terbilang cukup kontroversial dan akan menjadi bahasan utama dalam tesis ini adalah militerisasi bantuan asing atau internasional. Isu ini sendiri sudah menjadi bahasan utama sekaligus mengalami peningkatan sorotan terhadapnya sejak tahun 1990-an sebagai bagian dari peningkatan faktor politik dalam hal bantuan asing. Dalam konteks ini sekaligus dengan mengikuti banyak bermunculannya jenis-jenis baru konflik, salah satu alasan kuat mengapa sekarang militer jadi harus terlibat dalam aksi penyaluran bantuan kemanusiaan adalah demi terwujudnya resolusi konflik dan rekonstruksi sosial yang juga menjadi bagian dari *peacebuilding framework*. Contoh-contoh nyatanya sampai sejauh ini ada dalam sejumlah peristiwa pertempuran besar seperti misalnya Peristiwa Perang Kosovo, Timor Leste, Afghanistan dan Iraq. Sedangkan contoh jenis aksi-aksi nyata dari penyaluran bantuan kemanusiaan yang juga harus turut serta melibatkan peran aktif militer tersebut adalah penyediaan akses terhadap bantuan makanan, layanan kesehatan dan fasilitas pendukung sistem pendidikan nan memadai bagi anak-anak pengungsi di tengah-tengah wilayah konflik tersebut. Hal ini pun sekaligus menjadi bagian dari adanya "*humanitarian space*" dalam setiap misi keamanan dan kemanusiaan walau kemudian sempat muncul pertanyaan tentang apa saja perbedaan peran personel militer dan lembaga-lembaga misi kemanusiaan dalam merespon dinamika situasi keamanan di wilayah terkait setempat.

Semua ini kebetulan sekali juga sudah terus semakin mencuat lebih banyak lagi setelah terjadinya Peristiwa 11 September 2001 terutama dengan Amerika Serikat yang melakukan intervensi militer dalam bentuk invasi atau perang di Afghanistan dan Iraq, menunjukkan betapa pentingnya peran penyaluran bantuan kemanusiaan oleh mereka sekaligus sebagai bagian dari tugasnya selain menjadi benteng pertahanan atas serangan musuh. Hal ini pun kemudian menjadi erat sangkut-pautnya dengan kondisi geopolitik dan geostrategis, pertemuan peran antara militer dan sipil untuk sejumlah bantuan kebutuhan kemanusiaan berdasarkan prinsip, hak dan hukumnya terhadap prioritas keamanan internasional serta sistemnya baik untuk isu utama maupun bukan. Di samping perdebatan antara militer dan organisasi non-pemerintah (*non governmental organizations/NGOs*) mengenai peran dan karakteristik mereka dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, namun sesungguhnya ternyata mereka

berada dalam satu *framework* yang sama untuk mewujudkan keamanan, perdamaian dan penyaluran bantuan kemanusiaan serta revitalisasi lingkungan setempat sesuai terjadinya kecamuk perang pada wilayah suatu negara.⁸

Khusus dalam konteks untuk penelitian tesis ini, jenis bantuan kemanusiaan berikut juga pendampingannya atau *humanitarian assistance* yang akan dipakai adalah *militarization of humanitarian assistance* mengingat insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang masih merupakan bagian dari peristiwa militer Indonesia dan tentu saja itu mendapatkan perhatian lebih paling banyak dari kalangan militer selain warga sipil. Lalu juga dengan melihat bahwa insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang juga terjadi di luar situasi perang inilah, maka kemudian penulis ingin menambahkan lagi bahwa peningkatan peran militer dalam upaya menyalurkan bantuan asing di luar situasi perang memang menjadi sangat penting selain untuk mewujudkan rasa solidaritas kemanusiaan, bisa juga untuk meningkatkan stabilitas keamanan kawasan dengan mendatangkan sekaligus mempertemukan-mempersatukan banyak pasukan militer dari berbagai negara sebagaimana mereka turut serta membantu evakuasi KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara pada 2021 silam.

1.6.5 Contoh Kejadian Nyata Selain Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala 402, Yakni Insiden Tenggelamnya Kapal Selam Kursk Milik Angkatan Laut Rusia Pada Tahun 2000 di Laut Barents, Rusia. (Ditulis Berdasarkan Hasil Kutipan dari Jurnal “*Learning from the Kursk Submarine Rescue Failure: the Case for Pluralistic Risk Management.*” Annette Mikes. Amram Migdal. Harvard Business School, Amerika Serikat. 2014).

Insiden serupa mengenai kapal selam tenggelam yang pernah menghebohkan dunia pada masanya adalah Kapal Selam Kursk milik Angkatan Laut Rusia pada 12 Agustus 2000 silam. Ketika itu, Kapal Selam Nuklir Kelas Kilo Tipe K-114 tersebut baru saja berangkat dari Saint Petersburg menuju Laut Barents Rusia

⁸ Daniela Nascimento. University of Coimbra, Coimbra, Portugal. The Journal of Humanitarian Assistance. 2015. “One step forward, two steps back? Humanitarian Challenges and Dilemmas in Crisis Settings.” <https://reliefweb.int/report/world/one-step-forward-two-steps-back-humanitarian-challenges-and-dilemmas-crisis-settings>. Diakses 17 Mei 2023 Pukul 11.35 WIB.

untuk latihan perang bersama Armada Laut Utara Rusia di bawah Panglimanya yakni Laksamana Vyacheslav Popov. Semula semuanya tampak baik-baik saja termasuk dalam pantauan Angkatan Laut Inggris dan Kolonel David Russell yang dulu pernah bersahabat dengan Laksamana Vyacheslav Popov namun mendingin karena buruknya hubungan Inggris-Rusia.

Termasuk Panglima AL Rusia Laksamana Vladimir Kuroyedov, Semua perwira dan pasukannya menanti Kapal Selam Kursk datang. Namun rupanya di tengah perjalanan, Kapal selam nuklir tersebut mengalami ledakan akibat peningkatan suhu tabung torpedo yang diabaikan oleh pimpinan awaknya-- Sehingga ini kemudian mengakibatkan Kapal Selam Kursk tenggelam cukup jauh sampai ke Dasar Laut Barents. Sampai belasan jam setelahnya, Tidak ada satupun Perwira AL Rusia yang menyadari insiden nahas ini hingga kemudian Kolonel David Russell memastikannya kepada Laksamana Vyacheslav Popov. Usai menyadarinya, Laksamana Vyacheslav Popov lalu mencoba menghubungi Panglima AL Rusia Vladimir Kuroyedov guna berkoordinasi terkait persiapan evakuasi bahkan termasuk di antaranya yang menggunakan bantuan asing dari Inggris oleh Kolonel David Russell tersebut.

Dia meminta agar atasannya yang diketahui berpangkat Kapten itu dapat segera mengizinkannya untuk melepaskan mesin tabung torpedo dengan cara menembakkannya langsung di bawah permukaan air laut. Namun sang Kapten malah justru menolaknya mentah-mentah, alih-alih menuruti permintaan anak buahnya itu sehingga akibat itulah maka tidak perlu lama berselang kemudian mesin tabung torpedo yang suhunya tadi sudah memanass itu pun langsung saja meledak di dalam ruang mesinnya sambil sekaligus meledakkan sebagian badan Kapal Selam Kursk itu juga. Ledakkan mesin tabung torpedo itu tak pelak membuat Kapal Selam Kursk jatuh secara cukup drastis dari ketinggian dan kedalaman semula di bawah permukaan air laut sampai ke dasar laut hanya dalam waktu singkat usai sekaligus menewaskan hampir sebagian besar awaknya. Yang masih selamat pada awal kejadian ledakan ini hanya 23 orang, sebelum kemudian mereka segera berpindah tempat mencari ruangan yang aman untuk bertahan hidup sekaligus menyelamatkan diri secara serba terbatas.

Sampai belasan jam berikutnya, Kapal Selam Kursk yang sudah tenggelam sampai jauh ke dasar laut Rusia ini pun rupanya masih belum sempat diketahui sekaligus disadari oleh Panglima

Armada Laut Utara Rusia Laksamana Vyacheslav Popov berikut juga para rekan-rekannya sesama Petinggi Angkatan Laut Rusia termasuk Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Vladimir Kuroyedov. Pihak yang benar-benar menyadari soal Insiden Tenggelamnya Kapal Selam Kursk ini barulah Pasukan Angkatan Laut Inggris di bawah Komando Kolonel David Russell itu sendiri. Secara berulang kali dari Markas Angkatan Laut Inggris, Kolonel David Russell terus bersusah payah mencoba menghubungi Laksamana Vyacheslav Popov namun selalu nihil hasilnya. Namun setelah sekian lama bersusah payah, barulah kemudian Kolonel David Russell berhasil menghubungi perwira angkatan laut sekaligus sahabat baiknya sejak lama itu dan langsung mencoba mengabari dengan berbicara apa adanya terkait apa yang baru saja dialami oleh Kapal Selam Kursk pada hari itu.

Namun secara berulang kali orang nomor satu di jajaran AL Rusia tersebut selalu bersikeras menolak tawaran bantuan asing dari Inggris tersebut dengan alasan menjaga harga diri Rusia dari dingginya hubungan bilateral dengan Inggris sekaligus karena ia enggan membocorkan dokumen rahasia militer yang saat itu juga berada di Kapal Selam Kursk, Sekaligus menjadikan mereka terlihat seolah-olah menutupi semua kebenaran informasi ini. Lalu singkat cerita usai gagal mengevakuasi sendiri, AL Rusia akhirnya menyetujui tawaran bantuan dari AL Inggris tersebut dan kemudian evakuasi pun dimulai. Akan tetapi sayangnya keputusan itu terlambat dikeluarkan karena saat ditemukan, Semua Awak Kapal Selam Kursk yang sebelumnya masih sempat bertahan hidup di dalamnya malah justru sudah tewas akibat tersengat listrik yang bercampur dengan air selain karena mulai kekurangan oksigen dan kondisi kesehatannya yang juga terus menurun.

1.7 Kerangka Pemikiran

Teori Kerja sama Internasional, berdasarkan hasil kutipan dari salah satu sumber referensi terpercaya, didefinisikan sebagai bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara-negara di seluruh dunia dengan meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan dan ekonomi sekaligus berpedoman kepada politik luar negeri masing-masing negara (Yanuar Ikbar, 2014: 273). Penjelasan tentang kerja sama pun kemudian turut memunculkan sebuah perdebatan antara

neoliberalisme dan neorealisme. Menurut Joseph Grieco, kerja sama demikian bisa saja jadi tidak efektif atau bisa juga berakhir ketika salah satu pihak pesertanya melakukan kecurangan. Teori Neoliberalisme dianggap terlalu meremehkan anarki. Dalam konteks anarki ini, kecurangan yang juga dianggap “sah-sah saja”-pun malah justru menjadi rintangan terbesar yang mungkin terjadi dalam kerja sama antara aktor-aktor rasional dan egois ketika tidak ada otoritas sentral dalam dunia internasional (Yanuar Ikbar, 2014: 281). Sedangkan Mearsheimer (1995) menyebut kerja sama sulit tercapai karena negara boleh jadi menilai dengan adanya kerja sama nanti malah justru akan mengganggu upaya mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan dan kepentingan nasional.

Kerja sama antara negara dengan non-negara muncul karena mereka sebagai kedua aktor utamanya merasa saling membutuhkan satu sama lain guna mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, serta keberadaan institusi atau organisasi dapat mengurangi biaya serta menyediakan informasi dalam kerja sama (Robert O. Keohane & Joseph Nye, 2001). Kemudian Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) menyebut jika keberhasilan kerja sama terkait dengan masalah kesamaan (mutualitas) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat dan bayangan masa depan (*shadow of the future*) yang mencakup sebanyak empat faktor yakni harapan masa depan, keteraturan situasi, ketersediaan informasi tentang aktor-aktor lain dan cepatnya umpan balik dalam suatu kerja sama.⁹

Dalam konteks dinamika regional Asia-Pasifik, ada banyak kerja sama militer termasuk salah satunya AUKUS dengan Tiongkok yang juga mulai bermain dengan kerja sama maritim. Konteks ini pun dilihat dengan ketegangan antara Blok Barat dan Tiongkok. Khusus untuk konteks penelitian tesis ini, Evakuasi KRI Nanggala 402 digunakan oleh Indonesia untuk menjaga stabilitas Kawasan Asia Tenggara dari Tiongkok dan Negara-Negara Barat seperti Amerika Serikat, Eropa bahkan yang lebih dekatnya lagi Australia. Terlebih lagi dalam rangka *ASEAN Matters* dan *Epicentrum of Growth*, salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan adalah untuk saling menolong ketika terjadi permasalahan.

⁹ Annaas Maulana Bagaskara. Departemen Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang. Jawa Tengah. 2018. “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan *Child Trafficking* di Indonesia.” <https://ejournal3.undip.ac.id > article > download>. Diakses 31 Maret 2023 Pukul 10.55 WIB.

- Konsep Soliditas Negara Kawasan:

Mengutip pernyataan Ketua Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Ekonomi Amerika Latin dan Karibia (*UN ECLAC*) Alicia Bárcena, integrasi dan solidaritas regional bersifat sangat esensial dan penting untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin asimetris dan mengatasi kesenjangan antara negara maju dan berkembang dengan kaitannya untuk mewujudkan sebuah strategi kebijakan yang saling terintegrasi satu sama lain¹⁰. Sampai sejauh ini, pernyataan tersebut dimaksudkan oleh Ketua *UN ECLAC* Alicia Bárcena untuk membicarakan keadaan terkini negara-negara Amerika Latin serta Kepulauan Karibia dan sekitarnya dalam konteks ekonomi. Namun kalau ditarik secara lebih dalam dan lebih jauh lagi, pernyataan sekaligus definisi tersebut pun sebenarnya masih dapat disangkut-pautkan untuk ASEAN juga, terutama dalam konteks kekuatan militer dan stabilitas kawasan.

Bicara soal kekuatan militer, kalau boleh diakui sebenarnya memang masih belum ada atau tidak ada satupun negara ASEAN yang memiliki tingkat kekuatan militer cukup mumpuni atau berkelas dunia setingkat Amerika Serikat, Eropa, Rusia, Tiongkok dan lain-lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan pribadi penulis yang sampai sejauh ini pun mengetahui bahwa dari segi jumlah alat-alat utama sistem pertahanan (alutsista) saja, belum ada satu pun negara ASEAN yang memilikinya dengan jumlah ideal termasuk bahkan di antaranya untuk kekuatan armada kapal selam mereka. Indonesia saja sampai sekarang baru sebatas memiliki sebanyak empat buah armada kapal selam aktif dengan salah satu di antaranya yang sudah tenggelam yakni KRI Nanggala 402. Sedangkan sisanya mayoritas adalah armada kapal perang atau kapal apung biasa. Singapura pun sama saja demikian walau ia adalah satu-satunya negara paling maju pada Kawasan ASEAN ini, hanya diperkuat dengan Kapal MV Swift Rescue dan satu ROV sebagai armada penyelamat kapal selam yang juga sudah pernah

¹⁰ UN ECLAC. CEPAL. 2022. "Regional Integration and Solidarity are Essential to Confront Growing Global Asymmetries and Disparities Between Developed and Developing Countries." <https://www.cepal.org/en/news/regional-integration-and-solidarity-are-essential-confront-growing-global-asymmetries-and>. Diakses 19 Mei 2023 Pukul 05.10 WIB.

dipakai untuk evakuasi KRI Nanggala 402 sebagai bahasan tesis ini. Lalu Malaysia dan sisa negara ASEAN lainnya pun sama saja situasinya dengan RI & Singapura.

Khusus untuk Indonesia, hal ini pun sebenarnya memang sudah sejak lama menjadi perhatian khusus Pemerintah mengingat jumlah armada kapal selamnya yang memang sangat kurang itu. Untuk negara kepulauan dan perairan seukuran Indonesia begini, idealnya seharusnya memiliki sebanyak 12 armada kapal selam atau bahkan lebih lagi dari itu yang bisa saja, boleh saja hingga mencapai 15 atau 20 armada kapal selam dan jumlah sebanyak ini pun sebenarnya memang pernah tercapai pada masa pemerintahan Rezim Orde Lama-nya Ir. Soekarno di era dekade 1950-an hingga 1960-an silam dengan hadirnya sebanyak 12 armada kapal selam Kelas Whiskey dari Uni Soviet. Memasuki masa pemerintahan Rezim Orde Baru-nya Soeharto, kapal-kapal selam Kelas Whiskey dari Uni Soviet tersebut dijual keluar negeri seiring memburuknya hubungan Indonesia dengan Uni Soviet akibat krisis politik 1965-1966. Ke-12 armada kapal selam Kelas Whiskey dari Uni Soviet tersebut lalu digantikan oleh armada kapal selam Kelas U-209 dari Jerman, akan tetapi sejak saat itu hingga sekarang jumlahnya sama sekali masih belum bisa menyamai jumlah di era Orde Lama sebelumnya.

Maka untuk mengatasi jumlah kekurangan yang sudah berkepanjangan tersebut, dalam kurun waktu selama kurang-lebih 10 Tahun belakangan ini Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi jumlah ideal kapal selam dengan mengadakan program kerja sama bersama sejumlah negara produsen seperti Korea Selatan untuk pengadaan kapal selam Kelas Changbogo (berbentuk tipe seperti Kelas U-209 dari Jerman) dan Perancis untuk pengadaan kapal selam Scorpene (sama atau setipe dengan kapal selam milik Malaysia, Brazil, India, dsb). Untuk kerja sama pengadaan kapal selam Kelas Changbogo dari Korea Selatan, sebagai informasi sampai sejauh ini pun sudah ada tiga buah armada kapal selam yang selesai dibuat serta juga sudah digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Seharusnya, Indonesia masih akan menerima sisa sejumlah armada kapal selam Kelas Changbogo ini pun secara langsung dari Korea Selatan akan tetapi akibat *project* pengadaannya yang sudah kepalang berhenti karena satu dan lain hal-nya inilah, sampai sekarang sisa pesanan armada kapal selam Kelas Changbogo ini pun jadi belum selesai dan entah apakah masih akan dilanjutkan lagi oleh Pemerintah

Indonesia dan Korea Selatan ataukah tidak. Sedangkan untuk kerja sama pengadaan kapal selam Kelas Scorpene dari Perancis, sampai sejauh ini Pemerintah Indonesia baru dan sudah memesan sebanyak dua buah armada kapal selam yang rencananya akan segera diselesaikan dalam waktu hingga beberapa tahun ke depan.

Fokus lagi kepada bahasan mengenai tingkatan jumlah ideal atas armada kapal selam dari seluruh negara-negara ASEAN, untuk konteks menumbuhkan kawasan ini kedepannya sebagai *epicentrum of growth* dari segi kekuatan pertahanan-keamanan militer apalagi dengan menggunakan basis armada kapal selam, sampai saat ini jumlah yang ada ini pun memang masih belum memenuhi standar ideal. Pemerintah masing-masing negara wajib menaruh perhatian besar pada hal ini, terlebih lagi sekarang-sekarang ini Kawasan ASEAN itu sendiri juga tengah menghadapi sejumlah dinamika geopolitik besar seperti Konflik Laut Tiongkok Selatan, AUKUS, dan lain-lain sebagainya dimana semua itu jelas akan sangat membutuhkan tingkat jumlah kekuatan armada kapal selam dengan standar yang sangat mumpuni.

Kedepannya, mereka juga harus mempersiapkan diri guna menghadapi tantangan-tantangan geopolitik tersebut sebagai suatu kawasan yang solid dari segi kekuatan militer atau strategisnya. Sedangkan untuk saat inilah, satu hal yang menurut penulis sudah sangat baik, cakap dan mumpuni di ASEAN adalah kerja sama dalam misi kemanusiaan berupa evakuasi korban bencana alam kecelakaan transportasi umum di laut dan di udara, mencakup di antaranya yakni evakuasi KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara pada Tahun 2021 silam sekaligus sebagai bahasan utama dalam tulisan tesis ini. Maka oleh karena itulah dengan begitu, kedepannya nanti akan sangat dibutuhkan solidaritas tinggi di antara negara-negara ASEAN seiring dengan peningkatan jumlah armada kapal selam dan kekuatan militernya secara umum agar lebih solid menghadapi tantangan geopolitik tersebut.

- *Teori Regional Security Complex:*

Menurut Barry Buzan, teori ini pun sesungguhnya sangat memungkinkan suatu negara menganalisis dan menjelaskan perkembangan negara-negara dalam suatu kawasan sebagai sebuah

konsep baru untuk struktur keamanan internasional dan dimensi yang menghubungkan pola kehidupan antar negara di tataran internasional sebelum era perang dingin, di era perang dingin dan pasca perang dingin. Teori ini pun memberikan pandangan yang berbeda serta beragam namun masih sekaligus dengan pengaruh yang cukup teoritis. Dalam teori ini, permasalahan mengenai keamanan negara-negara sangat terkait erat sehingga tidak mungkin tidak memperhitungkan keamanan wilayah walau ada ketergantungan antar negara di suatu kawasan. Namun hal ini bukan berarti keadaan harmonis di antara mereka jadi akan selalu bisa dipengaruhi oleh beraneka ragam hal seperti perimbangan kekuatan, aliansi dengan negara lain dan kehadiran dari sebuah kekuatan eksternal pada kawasan tersebut.

Lalu teori ini juga didefinisikan menjadi bagaimana suatu negara mengupayakan terwujudnya keteraturan dan keamanan kawasan dengan cara menjalin kerja sama bersama negara-negara tetangganya di kawasan tersebut melalui dua rumusan variabel yakni variabel internal yang mencakup letak geografis (melihat seberapa besar peranannya karena tidak semua negara yang dekat itu bisa bekerjasama), interaksi antar negara (melihat seberapa sering dan dekat interaksi mereka dalam suatu kawasan, seberapa dalam dan merasa jadi satu kesatuan, ataukah tidak), kesamaan sistem (berbagai kesamaan secara budaya, ekonomi, sosial dan politik, semakin banyak yang sama maka akan semakin kompleks namun bisa semakin solid) serta variabel eksternal yang mencakup situasi internasional (melihat kondisi lingkungan internasional, apakah itu mendukung terbentuknya pengaturan keamanan atau tidak) dan isu-isu yang sedang berkembang (apakah ini nanti membutuhkan kerja sama negara kawasan terutama dalam hal pengaturan keamanan ataukah tidak).¹¹

Teori *Regional Security Complex*, Sepintas jika dikaitkan dengan topik bahasan utama dalam tesis ini pun sesungguhnya masih terbilang sulit karena teorinya itu sendiri juga masih banyak berkuat pada isu-isu seputar pertahanan dan keamanan regional yang masih bersifat tradisional. Namun kalau sudah bisa ditelaah secara lebih dalam lagi, sesungguhnya insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini

¹¹Nofita Andes Nurdiana. Universitas Mulawarman. 2018. "Peran Poliitik dan Keamanan Rusia di Kawasan Asia Tengah." [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/6.%201402045047%20-%20Nofita%20Andes%20Nurdiana%20\(09-14-18-01-39-39\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/6.%201402045047%20-%20Nofita%20Andes%20Nurdiana%20(09-14-18-01-39-39).pdf). Hal. 2-3. Diakses 18 Mei 2023 Pukul 06.30 WIB.

pun masih akan sangat erat kaitannya dengan masalah keamanan mengingat itu terjadi saat sedang dalam misi latihan perang di Laut Bali Utara.

Lalu seperti yang sudah sempat, pernah atau bahkan sering ditulis dalam tesis ini di bagian sebelumnya, Di tengah-tengah tantangan geopolitik yang terus semakin bermunculan di sekitar kawasan ASEAN belakangan ini, Insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada Tahun 2021 di Laut Bali Utara tersebut pun sesungguhnya memang ditanggapi atas dasar kemanusiaan sehingga oleh karena itulah ketika Indonesia sebagai pemilik kapal selam sekaligus lokasi tenggelamnya tersebut meminta bantuan kepada negara lain yang juga sama-sama tengah menghadapi tantangan geopolitik, maka otomatis negara-negara lain tersebut pun akan langsung mengerahkan bantuan dengan mengesampingkan masalah geopolitik atau hal-hal lainnya yang dapat mengganggu hubungan bilateral dengan Indonesia.

Hubungan Bilateral Kedua Negara, berdasarkan kutipan tentang teori terkait dari sumber referensi paling relevan—didefinisikan sebagai suatu jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Istilah ini umumnya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan dua negara terutama untuk konteks hubungan, politik, ekonomi dan budaya antara mereka berdua. Mayoritas praktik hubungan internasional (HI) pada saat ini dilakukan secara bilateral seperti yang tertuang dalam perjanjian kerja sama, pertukaran orang, barang dan jasa serta kunjungan antar-negara. Sedangkan alternatif lainnya yakni hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara serta unilateral yang satu negara berjalan masing-masing atau sendiri-sendiri (*Freewill*).¹²

Dalam konteks kerja sama evakuasi KRI Nanggala-402 ini, kerja sama internasional antara Indonesia dengan Singapura dan negara-negara atau aktor lainnya di sini pun sudah sangat terlihat jelas. Mereka saling bekerja satu sama lain dalam misi kemanusiaan ini, berdasarkan Teori *Regional Security Complex* sebagaimana ini juga menjadi acuan dasar utama bagi tulisan tesis ini.

¹² Universitas Medan Area. 2021. "Pengertian Serta Contoh Hubungan Bilateral, Unilateral dan Multilateral." <https://barki.uma.ac.id/2021/11/29/pengertian-serta-contoh-hubungan-bilateral-unilateral-multilateral/#:~:text=Hubungan%20bilateral%20atau%20dalam%20bahasa,ekonomi%20di%20antara%20dua%20Negara>. Diakses 31 Maret 2023 Pukul 12.50 WIB.

Dikutip dari salah satu sumber rujukan referensi terpercaya untuk tesis ini, bantuan luar negeri (internasional/asing) didefinisikan sebagai salah satu instrumen dalam sistem kebijakan luar negeri yang sudah lazim digunakan dalam praktik hubungan internasional (HI) sejak berabad-abad yang lalu. Lazimnya, sebuah bantuan luar negeri (internasional/asing) kerap kali diberikan atau disumbangkan dalam bentuk uang (finansial). Akan tetapi dalam praktiknya selama ini, bantuan luar negeri (internasional/asing) itu pun kerap kali diberikan atau disumbangkan dalam bentuk barang atau bantuan teknis dari negara donor kepada negara penerima bantuan. Bahkan secara lebih jauh lagi, bantuan luar negeri (internasional/asing) ini pun kerap kali dimasukkan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri sebagaimana Pakar Politik Amerika Serikat Richard Snyder mendefinisikan hal ini sebagai strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintah suatu negara demi mencapai tujuan/kepentingannya dalam konteks hubungan bilateral bersama negara lain.

Kemudian selain itu, definisi lain dari bantuan luar negeri (internasional/asing) adalah hal ini yang juga dinyatakan sebagai salah satu instrumen ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka terutama sejak berakhirnya era Perang Dunia Kedua (1939-1945). Selain dalam bentuk uang, bantuan luar negeri (internasional/asing) ini pun dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa, bahkan juga bantuan militer dan bantuan pangan. Dalam puluhan tahun belakangan ini, bantuan luar negeri (internasional/asing) dengan berbagai tujuan seperti misalnya peningkatan infrastruktur di negara penerima menjadi lumrah dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia ini.

Dalam banyak contoh kasus, bantuan luar negeri (internasional/asing) yang paling banyak diberikan oleh negara pendonor kepada negara penerima adalah bantuan ekonomi seperti halnya Tiongkok yang belakangan ini diketahui aktif menyumbangkan bantuan luar negeri (internasional/asing) kepada sejumlah negara-negara di Benua Afrika dalam bentuk berupa bantuan ekonomi¹³. Akan tetapi khusus dalam penelitian tesis ini, juga sekaligus masih dengan merujuk pada

¹³ T. Tiara Tri Irawan. Universitas Andalas. Padang, Sumatera Barat. BAB I. "Latar Belakang Bantuan Luar Negeri." <http://scholar.unand.ac.id/37224/2/ala%20bab%201.pdf>. Diakses 23 Maret 2023 Pukul 05.15 WIB.

sumber kutipan referensi tersebut penulis akan memfokuskannya kepada jenis bantuan luar negeri (internasional/asing) berupa bantuan militer.

Mengutip isi dari Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Militer Asing dalam Rangka Pencarian dan Pertolongan di Indonesia, Bantuan Militer Asing dalam Rangka Pencarian dan Pertolongan di Indonesia didefinisikan sebagai keikutsertaan militer asing sebagai bagian dari Unsur Badan SAR Nasional (Basarnas) pada operasi pencarian dan pertolongan akibat kecelakaan, bencana, serta kondisi yang membahayakan manusia yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sini, Basarnas disebut sebagai lembaga non-kementerian yang secara langsung berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden.

Pencarian dan pertolongan adalah segala usaha dalam kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Sedangkan kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana. Semua itu lazimnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan banyak jenis kendaraan/alat transportasi penunjang seperti pesawat terbang dan kapal untuk mengevakuasi korban oleh otoritas berwenang di bawah pimpinannya sendiri.

Asas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan adalah asas kemanusiaan, kebersamaan, kepentingan umum, keterpaduan, efektivitas, keadilan, kedaulatan dan non-diskriminatif. Sedangkan prinsip penyelenggaraan bantuan militer asing adalah tujuan sesuai misi pencarian dan pertolongan, kesatuan komando di bawah Basarnas, proporsional sesuai kebutuhan, legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan komunikasi di bawah koordinasi Basarnas. Lalu tujuan dari penyelenggaraan bantuan militer asing dalam pencarian dan pertolongan adalah mencari, menolong dan menyelamatkan korban secara cepat-tepat-aman-terpadu-terkoordinasi, mencegah dan

mengurangi fatalitas kecelakaan, menjamin penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh serta membantu pencarian alat atau benda yang sangat diperlukan dengan mekanisme dan persyaratan administrasinya sendiri.¹⁴

Kedua isu tadi, sebagaimana penulis juga sudah menyebutkannya di atas sebelum ini, akan menjadi isu utama dalam pembatasan masalah tesis ini kedepannya nanti. Selain bicara tentang isu-isu seputar bantuan luar negeri (internasional/asing) pada umumnya, tesis ini nantinya juga akan turut serta bicara tentang bantuan militer sebagaimana wujudnya selain uang (dukungan finansial) seperti cakupan isu utamanya juga yakni Analisis Kerja Sama Indonesia dan Singapura Dalam Evakuasi KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara Pada 2021.

Model-model Kerja Sama Maritim (Modelnya bisa untuk kepentingan evakuasi kapal selam), dibagi menjadi empat jenis atau tipe-tipe yang berbeda satu sama lain sebagai berikut:

a. Kerja Sama Keamanan Maritim,

Menurut kutipan dari penjelasan dalam sumber referensi terpercaya untuk bagian ini, keamanan maritim sebenarnya didefinisikan sebagai bagian yang merupakan masih termasuk dalam keamanan nasional dimana sistem pertahanan dan militer memiliki kaitan yang sangat erat antara satu sama lain di sini. Akan tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini, ancaman-ancaman keamanan dalam bentuk non-militer seperti kesehatan, ekonomi, bencana alam dan lintas negara atau transnasional dapat mengancam keamanan manusia. Di antara itu semua, muncul keamanan maritim yang kini tengah menjadi fokus negara-negara di seluruh dunia mengingat wilayah laut atau perairan sangat mudah dijadikan akses untuk masuknya celah-celah kejahatan transnasional karena perbedaan tingkat pengamanannya yang tidak seperti di daratan atau di udara.

¹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 12 Tahun 2016 Tentang Bantuan Militer Asing Dalam Rangka Pencarian dan Pertolongan di Indonesia. BAB I-II. Pasal 1-8.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/178295/permenhan-no-12-tahun-2016>. Diakses 23 Maret 2023 Pukul 05.40 WIB.

Hal itu disebabkan oleh disalurnkannya mayoritas distribusi perdagangan global melalui jalur laut dengan kapal-kapal yang berasal dari negara lain, membuat banyak negara jadi semakin memfokuskan keamanan nasionalnya pada bidang kemaritiman. Di sini, keamanan maritim bukan hanya sebatas didefinisikan sebagai keamanan kargo dan pelabuhan, melainkan juga dengan mencakup keamanan perbatasan yang kerap kali menjadi celah masuknya aneka jenis tindakan kejahatan transnasional. Ancaman keamanan maritim dapat juga mempengaruhi negara-negara lainnya, sehingga diperlukan upaya kolektif untuk segera dapat mengatasinya dengan melindungi jalur komunikasi laut, memfasilitasi dan melindungi proses perdagangan global yang terjadi di wilayah maritim setiap harinya, menjamin kegiatan pesisir dan IUU.¹⁵¹⁵

b. Kerja Sama Diplomasi Maritim,

Sedangkan Diplomasi Maritim—bedanya dengan Keamanan Maritim, didefinisikan dalam konsep Diplomasi Pertahanan Maritim oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) sebagai pengejawantahan integrasi aneka elemen eksternal dari Doktrin PMD, pencapaian tujuan-tujuan pertahanan maritim—mulai dari keamanan dan keselamatan di laut hingga stabilitas konflik dan ketegangan di kawasan sengketa melalui integrasi dan optimalisasi berbagai instrumen diplomatik, hukum dan militer (maritim), baik dalam keadaan damai, krisis atau perang.

Konsepsi DPM ini pun lebih diarahkan menjadi formulasi kerangka ideal tentang bagaimana seharusnya sebuah pemerintahan menjalankan diplomasi pertahanan maritim. Konsepsi ini juga diartikan sebagai tujuan strategi raya (perpaduan kebijakan pertahanan dan luar negeri) dimana dengan melihat lingkungan geostrategis berbasis perairan dan kepulauan serta lemahnya kapabilitas TNI AL untuk memproyeksikan kekuatan di luar batas wilayah, instrumen-

¹⁵ Arfin Sudirman. Yusa Djuyandi. Clara Rebecca. Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung. 2022. “Kerjasama Maritim Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Manusia.” <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/39048/pdf>. Diakses 1 April 2023 Pukul 05.15 WIB.

instrumen diplomatik adalah pilihan utamanya. Namun dalam konteks perubahan lingkungan maritim Indonesia, instrumen diplomatik tidak hanya diartikan secara sempit bagi Kemenlu itu sendiri—melainkan juga menjadi sebuah usulan agar kegiatan diplomasi yang sebenarnya bertujuan untuk memperkuat pertahanan maritim perlu turut serta melibatkan aktor-aktor lainnya seperti TNI AL, KKP, Bakamla, dsb.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, proses evakuasi KRI Nanggala 402 dikategorikan sebagai Kerja Sama Diplomasi Maritim dengan alasannya yang melihat bahwa sesungguhnya peristiwa ini sendiri terjadi di wilayah laut atau perairan, secara lebih spesifiknya yakni Laut Bali Utara serta proses evakuasinya yang tentu saja dilangsungkan di wilayah laut atau perairan itu sendiri dengan menggunakan sarana-prasarana kemaritiman berupa kapal perang dan kapal penolong/evakuasi dari masing-masing Pasukan Angkatan Laut setiap negara. Atau paling jauh selain dari laut, proses evakuasi KRI Nanggala 402 ini juga masih bisa dilakukan melalui jalur udara yakni dengan pantauan oleh Pesawat Poseidon P-8 dari Amerika Serikat (AS) yang memiliki kemampuan memindai dengan radarnya dari ketinggian ke permukaan.

c. Kerja Sama Industri Galangan Kapal,

Sedangkan untuk bagian yang ini, sampai sejauh ini sejujurnya penulis masih belum dapat menemukan definisi yang paling tepat dan sesuai khususnya pada bagian tema seputar kerja sama industri galangan kapal-kapal militer (angkatan laut). Namun dalam praktiknya, jenis kerja sama industri galangan kapal militer (angkatan laut) ini pun sebenarnya sudah pernah bahkan sering terjadi sejak lama—mencakup di antaranya untuk TNI AL. Sebagai informasi, sejak lama bahkan sejak awal-awal masa kemerdekaan—Indonesia khususnya TNI AL sudah

¹⁶ Kementerian Luar Negeri RI. 2023. "Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan dan Prospek." <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4IMjBCUFBLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xNV9EaXBsb21hc2l1fUGVydGFoYW5hbl9NYXJpdGltLnBkZg==>. Diakses 1 April 2023 Pukul 05.40 WIB.

pernah menjalin jenis kerja sama ini dengan Uni Soviet untuk pengadaan armada-armada kapal selam terbaru pada masanya itu yakni Kapal Selam Kelas Whiskey.

Pemerintah Indonesia memesannya kepada Pemerintah Uni Soviet, dan semua armada kapal selamnya itu lalu dibuat di Uni Soviet sebelum kemudian dikirimkan secara bertahap ke Indonesia di samping para calon awaknya yang semula juga sudah pernah dilatih oleh para Perwira Angkatan Laut Uni Soviet di wilayah setempat. Itu terjadi pada era Pemerintahan Rezim Orde Lama-nya Presiden Ir. Soekarno. Sedangkan pada era Pemerintahan Rezim Orde Baru-nya Presiden Soeharto, kerja sama industri galangan kapal berpindah kepada Jerman (kemungkinan saat itu masih bernama Jerman Barat dan Jerman Timur) mengingat lokasi pabrik kapal selamnya yakni *Howaldt-Deutsche Werke* (HDW, sekarang *Thyssenkrupp*) berada di Kota Hamburg. Kerja sama ini baru pertama kali dimulai pada akhir dekade 1970-an hingga awal dekade 1980-an silam ketika Pemerintah Indonesia melalui TNI AL memesan sebanyak dua buah armada kapal selam Kelas U-209 dari pabrik di negara tersebut.

Dua armada kapal selam yang dimaksud adalah KRI Cakra-401 yang mulai dibangun sejak Tahun 1977 dan selesai dibangun lalu beroperasi sejak Tahun 1981 bersama ‘saudara kembar’-nya yang juga sangat dikenal luas di Indonesia yakni KRI Nanggala-402. Selama puluhan tahun sejak saat itu, kedua armada kapal selam dari Kelas U-209 tersebut selalu saja tampil menjadi armada tempur andalan TNI AL bersama kapal-kapal lainnya juga. Memasuki dekade 2010-an ke atas atau setelah lebih dari 30 Tahun berselang, kerja sama industri galangan kapal selam Indonesia kini lalu berpindah ke Korea Selatan bersama Pabrik *Daewoo Submarine Engineering* (DSME) di Kota Okpo, Korea Selatan. Bersama Korea Selatan ini, Indonesia melalui TNI AL kali ini sukses dan berhasil mendapatkan sebanyak tiga buah armada kapal selam Kelas Changbogo yang serupa dengan Kelas U-209 berdasarkan hasil transfer teknologi (?) dengan Jerman sebelumnya. Ketiga armada kapal selam itu antara lain adalah KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404 dan KRI Alugoro-405. Khusus untuk KRI Alugoro-405,

ini menjadi satu-satunya armada kapal selam yang pertama kali dibuat di Indonesia berdasarkan hasil transfer teknologi dengan PT. PAL di Surabaya, Jawa Timur.

Untuk memenuhi target jumlah armada kapal selam yang paling ideal bagi Bangsa Indonesia kedepannya nanti (kurang-lebih sekitar 12-15 armada kapal selam), kerja sama pengembangan industri galangannya pun masih harus terus dikembangkan secara lebih kuat lagi secara bertahap sampai ke depannya mengingat prosesnya yang juga tidak mudah ini.

d. Kerja Sama Sosial Budaya Maritim.¹⁷

Sedangkan untuk poin ini—sekaligus masih dengan menyambung dari pemaparan pada poin-poin sebelumnya itu tadi, secara pribadi penulis menilai dan merasa bahwa berbagai kerja sama yang tadi sudah dilakukan sejak sebelum-sebelumnya itu perlu ditingkatkan lagi sekaligus disosialisasikan kepada khalayak ramai agar semakin banyak yang memahami bahwa maritim adalah identitas atau jati diri asli dari Bangsa Indonesia sekaligus sikap saling tolong-menolong dan gotong-royong yang pernah terlihat saat Misi Evakuasi KRI Nanggala 402 di Wilayah Perairan Laut Bali Utara Pada Tahun 2021 Silam.

Berdasarkan semua uraian di atas tadi, sampai sejauh ini penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk contoh kasus mengenai insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402 di Laut Bali Utara Pada 2021 silam terlihat sangat relevan dengan semua model yang tadi sudah diuraikan di atas. Model Kerjasama Keamanan Maritim, Diplomasi Maritim, Industri Galangan Kapal dan Sosial-Budaya Maritim terlihat sangat kuat terutama untuk ketiga model terakhir tersebut. Sebagai informasi, pada awal kejadiannya tersebut Pemerintah Indonesia melalui TNI AL sempat meminta pertolongan kepada ISMERLO. Lalu sejumlah negara sahabat juga turut menawarkan bantuan, yang berarti ini pun sebenarnya masih termasuk rumpun Diplomasi Maritim. Sedangkan untuk Industri Galangan Kapal, sudah jelas terbukti saat kerjasama tengah terjalin antara Indonesia dan Jerman untuk KRI Cakra-401 serta KRI Nanggala-

¹⁷Risky Amalia. Universitas Mulawarman. 2018. “Kerja Sama Maritim Indonesia-Tiongkok Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.” [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/27.%201302045022%20-%20Risky%20Amalia%20\(09-13-18-08-19-37\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/27.%201302045022%20-%20Risky%20Amalia%20(09-13-18-08-19-37).pdf). Diakses 31 Maret 2023 Pukul 12.55 WIB.

402 pada medio 1977-1981 silam serta dengan Korea Selatan untuk KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404 dan KRI Alugoro-405 pada medio 2017-2020 silam. Serta terakhir Kerja Sama Sosial-Budaya Maritim, seperti yang tadi sudah disampaikan di atas, kejadian ini pun kemudian benar-benar membuktikan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki jati diri asli berupa Bangsa Maritim dengan karakteristiknya yang gemar bergotong-royong dan saling-tolong menolong untuk kemudian dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing.

Sebagai tambahan, Diplomasi Maritim, dalam sumber kutipan lainnya didefinisikan sebagai “Pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.”¹⁸

Diplomasi Maritim di Selat Malaka sebagai dimensi baru Kerjasama Keamanan, Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana

Bagian ini akan secara khusus mencoba untuk membahas tentang isu pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana sebagaimana yang sebelumnya sudah pernah dibahas di Bab 1. Hal ini tertuang jelas dalam Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam bidang pertahanan yang ditandatangani pada 27 April 2007 silam di Bali. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan dimana Pasal 1 menjelaskan pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang meliputi antara lain:

1. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu keamanan;
2. Pertukaran informasi intelijen termasuk bidang penanggulangan terorisme;

¹⁸Keputusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) No. 128 Tahun 2019 Tentang Buku Putih Diplomasi Maritim.
<https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/keputusan-menteri-marves/kepmenko-no.-128-tahun-2019-tentang-buku-putih-diplomasi.pdf>. Diakses 31 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB.

3. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui;
4. peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata para Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait;
5. Pertukaran personel militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus dan program militer;
6. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama, serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu; dan
7. Kerja sama pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah para Pihak.

Dimana dengan penetapan Undang-Undang inilah, Maka kerjasama di bidang tersebut dinyatakan sah secara hukum sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.¹⁹ Dari ketujuh poin tersebut, Salah satu di antaranya yang paling relevan di sini antara lain adalah poin nomor tujuh mengingat awalnya tulisan tesis ini hendak membahas tentang isu bantuan kemanusiaan atau bantuan asing (*foreign aid*) sebagai topik utama sekaligus sebagai apa yang sudah pernah diberikan oleh Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia ketika terjadi Peristiwa Tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara pada Tahun 2021 silam. Umumnya ketika berbicara tentang isu bantuan kemanusiaan, Bentuk yang diberikan selalu berupa uang atau dukungan finansial. Namun kali ini untuk contoh kasus di Peristiwa Tenggelamnya KRI Nanggala 402, Bentuk dari bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia adalah berupa pengiriman armada kapal pencari yang jelas sesuai kebutuhan.

¹⁹ JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2023. "UU 3/2023: Pengesahan Perjanjian Kerja Sama Bidang Pertahanan antara RI-Singapura." <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>. Diakses 21 November 2023 Pukul 23.15 WIB.

Akan tetapi kendati demikian, Walau sepiantas bidang ini lebih cenderung terlihat sebagai isu pertahanan dan keamanan, Tidak jarang sebenarnya dampak perekonomian juga dapat terasa di sini. Karena bagaimana tidak mungkin, Kecelakaan satu jenis transportasi armada saja tidak jarang acap kali turut sekaligus menyebabkan kerugian hingga mencapai Milyaran bahkan Triliunan Rupiah mengingat harga satu buah armada yang biasanya sebanding dengan nilai tersebut. Belum lagi biaya ganti rugi atau asuransi keselamatan yang harus dibayarkan baik kepada korban maupun keluarganya setelah terjadi peristiwa kecelakaan tersebut. Sehingga oleh karena itulah, Mau bagaimanapun juga dukungan finansial ekonomi tetap diperlukan di dalam kerja sama penanganan peristiwa seperti ini.

Sementara itu kaitannya dengan *Global Maritime Fulcrum* (GMF) atau Visi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, Rasanya hal ini akan jadi berkaitan sangat erat dengan agenda besar Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak Tahun 2014 silam. Dalam visi ini, Indonesia dilihat sebagai negara dengan posisi yang strategis di antara 2 Benua (Asia dan Australia) serta 2 Samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) sekaligus dengan jadi adanya peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran penting sebagai sumber kekuatan maritim untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Di sini pula, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia wajib bekerja keras guna mengembalikan kejayaan maritimnya sebab samudera, laut, selat dan tanjung adalah masa depan dari peradaban bangsa serta masih menurutnya pula—Indonesia sendiri dinilai sudah terlalu lama memunggungi lautan dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menjunjung lagi semboyan nenek moyang Indonesia, *Jalesveva Jayamahe* dengan arti “Di Lautan Kita Berjaya Selamanya” sebagaimana itu juga menjadi semboyan TNI Angkatan Laut.

Secara luas, Visi besar ini ditujukan untuk mencapai Konektivitas antar pulau di Indonesia, Mengembangkan perekonomian nasional, Memperkuat keamanan maritim Indonesia dan Memperluas peran Indonesia di Kawasan Asia dan Indo-Pasifik sebagai penentu masa depan kemaritiman bangsa sehingga oleh karena itulah visi ini bukanlah strategi ofensif melainkan sebuah kebijakan luar negeri komprehensif melalui beberapa program pembangunan maritim mulai dari aspek infrastruktur, politik,

sosial budaya, hukum, keamanan, ekonomi, penguatan konektivitas maritim, rehabilitasi lingkungan dan peningkatan kualitas SDM kelautan. Lalu semua itu dijadikan 5 pilar utama, Di antaranya yakni:

- a. Membangun lagi budaya maritim Indonesia mengingat sejarahnya sebagai negara maritim,
- b. Mengelola sumber daya maritim dengan berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut melalui pembangunan kedaulatan pangan laut serta pengembangan industri perikanan yang mengutamakan nelayan,
- c. Komitmen dalam mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, pelabuhan, logistik, industri, perkapalan serta pariwisata maritim,
- d. Memajukan diplomasi maritim guna mengajak seluruh mitra pembangunan di Indonesia dan negara lainnya untuk bekerja sama di bidang kelautan,
- e. Membangun kekuatan pertahanan maritim²⁰.

Khusus untuk tesis ini, Poin yang dapat dijadikan acuan dalam topik penelitiannya adalah Poin D & E mengingat tesis ini juga sebenarnya membahas tentang diplomasi maritim sekaligus pembangunan kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam konteks atau kerangka peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kerja sama maritim antara Indonesia dengan sejumlah negara sahabat lainnya untuk pengadaan armada kapal selam baru guna membangun kekuatan pertahanan maritim selain kerja sama evakuasi saat tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara pada Tahun 2021 silam.

Mengenai Teori *Regional Security Complex*, Sekali lagi tesis ini nantinya juga akan menggunakannya sebagai acuan untuk menganalisa semua yang sudah ditulis di atas dan di bawah mengenai Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala 402 sebagai Titik Tolak Kerjasama Maritim ASEAN.

²⁰ Arijanto, Andini Putri. Universitas Katolik Parahyangan. 2019. "Implementasi Kebijakan Global Maritime Fulcrum di Kepulauan Natuna terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan." <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8908>. Hal. 1-3. Diakses 18 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB.

Sejak pertama kali dibentuk pada 7 September 1967 silam, kerja sama sekaligus merangkap Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura berfokus kepada sejumlah sektor atau bidang termasuk dua di antaranya yakni Kerja Sama Politik dan Ekonomi yang kedua-keduanya menjadi isu strategis bagi Indonesia dan Singapura sejak lama itu juga. Untuk kerja sama di bidang Politik, belum lama ini pada Tahun 2017 silam atau ketika usia Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura sudah akan nyaris genap menginjak usia 50 Tahun (usia emas), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkam RI) saat itu Wiranto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolkam RI) Jakarta.

Pada pertemuan bilateral antara kedua pejabat tinggi Indonesia dan Singapura itu pada saat itu, mereka berdua diketahui menyepakati kerja sama bilateral di bidang yang bersangkutan dengan mendasarkan pada hubungan baik antara kedua negara yang dapat saling menguntungkan satu sama lain. Saat itu Menkopolkam Wiranto mengawali pertemuan bersama Wakil PM Singapura Teo Chee Hean dengan terlebih dahulu membahas tentang kerja sama antara kedua belah pihak untuk memerangi terorisme dan radikalisme mengingat mereka juga memiliki musuh dan kondisi yang sama. Lalu Mantan Panglima ABRI Terakhir Periode 1998-1999 sebelum kemudian pasukannya berubah menjadi TNI seiring bergulirnya masa Reformasi ini pun menyinggung soal praktik kejahatan siber di Indonesia dan Singapura.

Dijelaskan oleh Purnawirawan Jenderal atau Perwira Tinggi Bintang Empat ini kepada Wakil PM Singapura Teo Chee Hean dan para awak media yang pada saat itu bertugas meliput pertemuan itu, pada saat itu di Tahun 2017 Indonesia memang masih belum terlalu lama mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara atau yang lebih populer dengan singkatan BSSN.

Apalagi pada saat itu sifatnya juga masih sektoral dengan membagikan perannya kepada sejumlah institusi atau kementerian/lembaga terkait. Sehingga oleh karena itulah, hubungan kerja sama antara Indonesia dan Singapura terkait upaya melawan praktik kejahatan siber ini pun masih perlu ditingkatkan lagi terlebih dengan mengingat Singapura yang sudah lebih dulu mendirikan dan memiliki

institusi serupa. Kemudian lebih lanjut lagi Menkopolkam Wiranto pada saat itu menambahkan pembicaraan tentang peran Indonesia dan Singapura dalam upaya penyelesaian masalah Laut Tiongkok Selatan. Menurutnya, pada saat itu kedua negara dinilai masih perlu menyatukan frekuensi karena memiliki tujuan senada yakni untuk mendorong penyelesaian masalah Laut Tiongkok Selatan secara damai dengan tidak menimbulkan konflik tanpa saling mengklaim melainkan dengan cara menghormati hukum nasional dan menahan diri dari melakukan satu aktivitas yang dapat menimbulkan konflik.²¹

Sedangkan untuk kerja sama di bidang Ekonomi, hanya beberapa bulan berselang namun masih pada tahun yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong lebih cenderung menekankan pada bidang kerja sama Ekonomi Digital. Menurut keterangan resmi Presiden Jokowi dalam agenda kunjungannya ke Singapura pada saat itu, kerja sama ekonomi digital sekarang sudah bukan lagi sebuah opsi atau pilihan melainkan sebuah keniscayaan yang akan menjadi prioritas bagi Indonesia dan Singapura. Kerja sama Ekonomi Digital yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan peluang investasi dan teknologi dengan talenta serta peluang pasar yang besar, maka sistem perekonomian Indonesia dan Singapura nantinya akan bisa melompat maju atau jadi bukan hanya sekadar melangkah maju.

Lalu selain kerja sama Ekonomi Digital, nantinya pada saat itu Indonesia dan Singapura juga akan lebih mengoptimalkan kerja sama di bidang Industri Wisata dengan melakukan sejumlah pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang dan pendukungnya tersebut. Terlebih lagi pada Tahun 2017 ini sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, Indonesia dan Singapura kebetulan juga tengah merayakan peringatan hubungan bilateralnya yang ke-50 Tahun sebagai momentum untuk mengapresiasi ASEAN sebagai kawasan yang damai, stabil dan sejahtera serta pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN agar tetap relevan bagi negara anggota dan warganya untuk dapat berkontribusi lebih besar lagi kepada dunia. “Tantangan 50 Tahun terakhir dapat kita lalui. Tantangan

²¹ Humas Kemenkopolkam RI. 2017. “Indonesia-Singapura Sepakati Kerja Sama Polhukam.” <https://polkam.go.id/indonesia-singapura-sepakati-kerja-sama-polhukam/>. Diakses 8 Maret 2023 Pukul 13.35 WIB.

50 Tahun ke depan akan berbeda.” Ujar Presiden Jokowi dalam agenda kunjungannya di Singapura pada saat itu.²²

Sedangkan untuk kerja sama di bidang pengiriman dan penerimaan bantuan internasional, misi kemanusiaan berupa evakuasi dan pertolongan darurat terutama untuk contoh peristiwa selain Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali Utara Pada 2021 silam, sampai sejauh ini penulis merasa praktik riilnya antara Indonesia dan Singapura itu sendiri sudah cukup baik terbukti dari seperti apa dan bagaimanakah respon Singapura ketika Indonesia mengalami sejumlah peristiwa bencana alam atau musibah kecelakaan transportasi massal dalam beberapa tahun belakangan ini khususnya pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Tahun 2014 Silam.

Seperti yang tadi sudah diceritakan pada bagian dan halaman-halaman sebelumnya, pada tahun pertama dari Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini publik pernah dihebohkan dengan terjadinya insiden kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 di Wilayah Perairan Laut Selat Karimata ketika pesawat itu sedang dan masih dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Singapura.

Penyebabnya konon adalah faktor kerusakan teknis yang baru diketahui setelah terjadinya kecelakaan dan terjebaknya pesawat nahas tersebut di tengah-tengah cuaca buruk pada rute penerbangannya tersebut. Usai berita tersebut menjadi viral, misi evakuasi pun segera dijalankan baik itu dengan mengerahkan segenap kekuatan domestik maupun dengan menerima bantuan asing (internasional) dari berbagai negara sahabat yang ikut turut serta membantu termasuk salah satu di antaranya yakni Singapura sebagai salah satu di antaranya dan berkat kedatangan bantuan asing itulah, singkat cerita tanpa perlu berlama-lama lagi misi evakuasi ini berhasil dijalankan dan dituntaskan seiring dengan ditemukannya para korban (walau sudah tewas) dan puing-puing pesawatnya itu.

²²Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2017. “Indonesia-Singapura Fokus Kerja Sama Digital.” [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10545/indonesia-singapura-fokus-kerjasama-ekonomi-digital/0/berita_satker#:~:text=Di%20antaranya%20melalui%20pengembangan%20destinasi,Conferences%20and%20Exhibitions%20\(MICE\)..](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10545/indonesia-singapura-fokus-kerjasama-ekonomi-digital/0/berita_satker#:~:text=Di%20antaranya%20melalui%20pengembangan%20destinasi,Conferences%20and%20Exhibitions%20(MICE)..) Diakses 8 Maret 2023 Pukul 13.50 WIB.

Sedangkan dalam tahun-tahun berikutnya yang juga menjadi sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni pada kurun-rentang waktu Tahun 2015-2019, mayoritas bentuk bantuan internasional yang dikirimkan atau juga sekaligus diberikan oleh Singapura kepada Indonesia saat membutuhkannya adalah masih berupa bantuan kemanusiaan untuk keperluan penanggulangan bencana alam. Sisa masa jabatan 2014-2019 berakhir, memasuki awal masa jabatan baru sekaligus kedua di 2019-2024 bentuk bantuan internasional yang diberikan oleh Singapura kepada Indonesia saat membutuhkannya mayoritas berubah jadi alat-alat kesehatan seiring merebaknya Pandemi Covid-19 pada masa-masa tersebut. Kemudian pada saat bersamaan, selain alat-alat kesehatan, Pemerintah Singapura juga mengirimkan lagi bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Indonesia berupa Kapal MV Swift Rescue beserta alat-alat pendukung dan penunjangnya berikut juga personel-personelnya dari Pasukan Angkatan Laut Singapura (*Republic of Singapore Navy/RSN*) yang diterjunkan dalam rangka untuk menyelamatkan KRI Nanggala 402 saat dikabarkan tenggelam di Laut Bali Utara Pada Bulan April 2021 Silam.

Menyambung dari poin-poin terdahulu, selama lebih dari 55 Tahun menjalin hubungan Indonesia dan Singapura tentu saja sudah melewati banyak sekali dinamika pasang-surutnya baik itu secara bilateral maupun regional dan di balik semua dinamika pasang-surut itu, sejatinya kedua negara juga sudah dan sedang memiliki banyak sekali jenis kepentingan nasional baik itu secara ekonomi, politik, pertahanan-keamanan dan lain-lain sebagainya. Dari semua jenis kepentingan nasional itu, menurut penulis sampai sejauh ini pun kebetulan semuanya sudah tercakup secara utuh dalam lebih dari 55 Tahun terjalinnya hubungan Indonesia dan Singapura. Sedangkan untuk penelitian dalam tesis ini, nantinya penulis akan seutuhnya memfokuskan topik penelitian kepada kerja sama pertahanan-keamanan antara Indonesia dan Singapura terutama yang dikaji dari sudut pandang atau perspektif bantuan kemanusiaan. Serta menurut penulis, di sini kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai serangkaian tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara untuk dapat bergerak menjadi lebih maju daripada sebelumnya. Namun tidak jarang dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, sebuah negara dapat saja mengalami kendala tertentu yang mengakibatkan mereka jadi harus siap dan

mau bekerja sama dengan negara lain sehingga oleh karena itulah terjalin sebuah hubungan kerja sama bilateral.

Kemudian dengan merujuk lagi pada Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura itu tadi, dalam 55 Tahun perjalanannya ini pun kedua negara bukan kebetulan dan juga bukan tidak mungkin pernah mengalami pasang-surut. Terutama untuk bagian mengenai surutnya hubungan itu akan menjadi bahasan utama dalam bagian ini dimana dalam kurun waktu selama kurang-lebih hampir 15 Tahun belakangan ini, saat menjalin kerja sama pertahanan kebetulan sekali negosiasi antara Indonesia dan Singapura pernah berjalan dengan alot terutama ini dalam konteks Perjanjian DCA dan Ekstradisi yang pada akhirnya dibatalkan sejak 15 Tahun silam walau belakangan ini, negosiasi tersebut pernah dicoba untuk dimunculkan lagi wacananya. Lalu hubungan bilateral ini juga pernah merenggang akibat terjadinya Peristiwa Kabut Asap dari Indonesia ke Singapura, membuat Pemerintah Singapura protes kepada Indonesia yang lalu dijawab dengan permintaan maaf. Namun hubungan itu kemudian dapat membaik lagi setelah kedua negara menjalin kerja sama kemanusiaan untuk mengevakuasi Pesawat AirAsia QZ8501 dan KRI Nanggala 402. Khusus untuk KRI Nanggala 402, peristiwa besarnya ini terjadi ketika armada kapal selam tersebut tengah mengikuti kegiatan latihan perang di Laut Bali Utara pada 2021 silam.

1.8 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Penyusunan tesis ini nantinya akan sepenuhnya didasarkan kepada metode kualitatif berupa studi dokumen. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang apa saja jenis metode penelitian dan pengumpulan data sebagaimana yang akan penulis gunakan dalam penyusunan tesis ini, sebelumnya penulis akan terlebih dahulu membahas tentang definisi dari ketiga jenis metode penelitian dan pengumpulan data tersebut.

Pertama, dilansir dari tulisan artikel jurnal karya Djoko Dwiyanto, Metode Penelitian Kualitatif pada umumnya dikenal sebagai suatu panduan atau tata cara penelitian yang dilandasi oleh kekuatan narasi, kajian dalam situasi alamiah, kontak langsung di lapangan, cara berpikir induktif, perspektif

holistik, perspektif perkembangan dinamis, orientasi pada kasus unik, pemerolehan data secara netral dan empatik, desain yang fleksibel atau luwes, sirkular dan penelitiannya yang berpegang teguh kepada instrumen kunci. Lebih detailnya lagi selain urutan daftar ciri-ciri di atas tersebut, menurut artikel jurnal ini penelitian kualitatif juga mengenal tata cara pengumpulan data yang lazim melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka pun nyatanya kebetulan harus dapat dibedakan dengan tinjauan pustaka, didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundang-undangan dan diploma atau sertifikat yang dapat dibagi dua lagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder demikian pula datanya yang nanti diperoleh jika penelitiannya sudah selesai.

Berikutnya teknik analisis dan interpretasi penelitian kualitatif yang sama sekali tidak terkait angka dan selalu cenderung lebih banyak menekankan pada narasi biasanya akan langsung ditampilkan dalam bentuk verbal (narasi, deskripsi atau cerita) dan seringkali berbentuk visual (foto atau gambar). Lalu penelitian kualitatif pun biasanya tidak memiliki rumus yang bersifat mutlak untuk mengolah dan menginterpretasikan data, melainkan berupa pedoman guna mengorganisasikan data, pengkodean (kodifikasi) dan analisis data, penghayatan dan pengkayaan teori serta interpretasi data.²³Menyesuaikan dengan uraian singkat diatas tadi, untuk sementara ini atau sampai sejauh ini penulis sendiri sudah dapat menyimpulkan bahwa penelitian dalam tesis ini nantinya akan benar-benar menggunakan Metode Penelitian Kualitatif ketika sudah dan sedang disusun.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bagian Sistematika Pembahasan untuk tesis ini nantinya akan memuat urutan demi urutan bagian yang terdapat dalam tesis ini sebagai berikut:

1.9.1 Bab I Berisi tentang Pendahuluan atau Latar Belakang Masalah,

1.9.2 Bab II Berisi tentang Pasang-Surutnya Hubungan Indonesia-Singapura (2012-2022),

²³Djoko Dwiyanto. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. 2023. "Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian." https://www.academia.edu/25249785/Metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian Diakses 8 Maret 2023 Pukul 16.05 WIB.

1.9.3 Bab III Berisi tentang Hubungan Kerja Sama Maritim Negara-Negara ASEAN,

1.9.4 Bab IV Berisi tentang Sikap ASEAN Terhadap Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan,

1.9.5 Bab V Berisi tentang Kesimpulan.